

**Laporan Penelitian  
Klaster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional**

**Gerakan Sosial Keagamaan dan Agenda Politik Kelompok  
Radikal Pasca Pemberlakuan Perpu No 2 Tahun 2017  
Tentang Organisasi Masyarakat: Studi Kasus Hizbut  
Tahrir Indonesia (HTI)**



**Disusun Oleh:  
Dr. H. Nur Hasan, M.Si (ID Peneliti: 202205530209679)  
Dr. H. Mochamad Parmudi, M.Si (ID Peneliti:  
202504690313850)**

**PENELITIAN INI DIDANAI OLEH DIPA BOPTN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
TAHUN 2018**

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	2
<b>Daftar Singkatan</b>	3
<b>Abstrak</b>	4
<b>Bab I Pendahuluan</b>	5
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah	14
C. Signifikansi Penelitian	14
D. Kajian Penelitian Terdahulu	15
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	21
G. Lokasi dan Jadwal Penelitian	23
<b>Bab II Hizbut Tahrir Indonesia: Sebuah Profil Organisasi</b>	25
A. Sejarah Singkat Hizbut Tahrir di Indonesia	25
B. Pemikiran Politik Hizbut Tahrir	43
C. Struktur Partai Politik Hizbut Tahrir	49
<b>Bab III Agenda Sosial Politik HTI Pasca Dibuparkan</b>	57
A. Pembentukan Wacana di Media Daring (Online)	57
B. Manipulasi Wacana Melalui Medsos	65
C. Infiltrasi dalam Organisasi Sosial Politik dan Kegiatan Dakwah	94
<b>Bab IV Respon Pemerintah Terhadap Anggota Eks HTI dan Gerakannya</b>	107
A. Merangkul HTI	112
B. Menggalakkan Program Deradikalisasi	121
<b>Bab V Kesimpulan</b>	131
<b>Daftar Pustaka</b>	135

## DAFTAR SINGKATAN

APJII	: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia	
Banser	: Barisan Ansor Serbaguna
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
GNPF-U	: Gerakan Nasional Pengawal Fatwa
Ulama	
HSN	: Hari Santri Nasional
HT	: Hizbut Tahrir
HTI	: Hizbut Tahrir Indonesia
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia	
Medsos	: Media sosial
MU	: Media Umat
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang	
Pilkada	: Pemilihan Kepada Daerah
Pilpres	: Pemilihan Presiden
SKB	: Surat Keputusan Bersama
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang gerakan sosial keagamaan dan agenda politik kelompok radikal di Indonesia pasca lahirnya Perpu No 2 Tahun 2007 tentang Organisasi Masyarakat. Untuk mengkaji tema tersebut penelitian ini dilakukan dengan mengangkat kasus agenda sosial dan politik yang dilakukan oleh eks anggota HTI dan gerakan organisasinya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kerangka teori konflik sosial marxisme penelitian ini menghasilkan beberapa temuan berikut. *Pertama*, pasca lahirnya Perpu yang secara tegas membubarkan badan hukum HTI sebagai organisasi masyarakat di Indonesia ditemukan bahwa eks anggota HTI tidak berhenti bergerak untuk memperjuangkan gagasan dan ideology gerakan. Upaya ini dilakukan dengan melakukan kampanye atas gagasan-gagasan khilafah melalui media daring secara intens. Kemudian mencoba menginfiltrasi dalam beragam organisasi sosial politik dan masuk dalam kegiatan-kegiatan dakwah keagamaan yang dilakukan oleh kelompok lain. *Kedua*, dalam rangka menghadapi gerakan eks anggota HTI ini pemerintah melakukan beberapa langkah. Diantara langkah tersebut pemerintah mencoba merangkul eks anggota HTI dan memberikan ruang bagi mereka untuk beraktivitas dalam sosial keagamaan dan politik asalkan tidak lagi menyebarkan gagasan HTI. Di sisi lain pemerintah gencar melakukan sosialisasi terhadap bahaya laten ideologi HTI dan menggencarkan program deradikalisasi yang bekerjasama dengan berbagai organisasi dan instansi.

**Keyword:** radikalisme, gerakan sosial politik, Hizbut Tahrir Indonesia

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam satu dekade terakhir kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia ditandai oleh sejumlah kasus ekstrimisme agama (*religious extremism*) yang dilakukan oleh beberapa organisasi. Pertanyaanya, apa itu ekstrimisme agama? Ekstrimisme agama dalam banyak literatur dimaknai beragam oleh para sarjana. Kata ekstrimisme agama juga sering digunakan secara bergantian dengan kata radikalisme, islamisme dan fundamentalisme agama (Striegher, 2015). Namun, dalam penelitian ini penulis hanya akan sering menggunakan istilah radikalisme dan ekstrimisme meski keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda. Dimana radikalisme agama adalah pemikiran dan tindakan beragama yang cenderung masih memiliki pemikiran yang sedikit terbuka (*little open-minded*), sedangkan ekstrimisme agama dimaknai sebagai pemikiran dan tindakan beragama yang tertutup dan memiliki kecenderungan untuk menggunakan kekerasan sebagai senjata untuk melawan pihak lain yang tidak sesuai dengan pandangan atau ideologi yang mereka anut (Schmid, 2013, iv). Namun, keduanya memiliki sikap yang dinilai dapat mengantarkan pada tindakan yang mengancam

orang lain dan termasuk mengancam tatanan sosial dan politik yang dinilai skuler, karena dianggap dapat menjadi sumber pada tindakan terorisme (Masgono, 2009).

Tindakan ekstrimisme keagamaan ada dalam semua agama (Hindu, Budha, Islam, Katolik dan Protestan), namun dalam wacana global dan termasuk di Indonesia sendiri tindakan ekstrimisme agama lebih banyak dilekatkan pada agama Islam (Hasyim, 2016). Hal ini tidak dapat dilepaskan dari aktivitas kelompok-kelompok Islam radikal yang secara fulgar menunjukkan tindakan ekstrimisme agama di ruang publik Indonesia.

Keterbukaan sistem politik pasca reformasi 1998 seolah menjadi lendakan besar bagi kelompok-kelompok ekstrimis dan radikal yang selama rezim Orde Baru tidak mendapatkan ruang untuk mengekspresikan ideologi, kepentingan sosial-keagamaan, dan agenda politik mereka. Problemnya, kebebasan tersebut banyak disalahartikan oleh banyak kelompok keagamaan yang mengusung ideologi radikal dan ekstrimisme. Anggota dari kelompok ini dengan mudahnya akan melakukan kekerasan kepada orang lain yang tidak memiliki pemahaman dan keyakinan beragama dengan mereka. Lebih dari itu, kelompok ekstrimisme juga melakukan perusakan atas rumah ibadah yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan dan ideologi keagamaan yang mereka anut.

Berdasarkan laporan Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) tahun 2016 menjelaskan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan hingga saat ini masih menjadi salah satu problem utama HAM di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari data pengaduan yang diterima Komnas HAM. Dimana pengaduan terkait dengan jaminan akan hak beragama dan berkeyakinan menempati lima besar dari isu terbanyak yang diajukan oleh masyarakat kepada Komnas HAM (Rahmat, 2017, 1). Data yang ada menjelaskan bahwa terdapat 97 pengaduan (rata-rata 8 pengaduan per bulan). Dari jumlah tersebut, ditemukan bahwa permasalahan pembatasan/pelarangan dan perusakan tempat ibadah adalah kasus yang paling banyak diajukan selama tahun 2016 (44 pengaduan), dan diikuti oleh kasus-kasus pembatasan, serta pelarangan ibadah atau kegiatan keagamaan (19 pengaduan) di Indonesia (KomnasHAM, 2017, 15).

Selain tindakan ekstrimisme agama dengan jalan kekerasan seperti tersebut di atas, di Indonesia juga terdapat kelompok-kelompok ekstrimisme agama yang memiliki pemikiran dan tindakan yang lebih berani dan radikal dalam mengaktualisasikan gagasan dan ideologi keagamaan yang mereka usung. Tindakan itu diwujudkan dalam bentuk resistensi secara fulgar atas eksistensi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Diantara kelompok organisasi yang

bernama Hizbut Tahrir Indonesia. Sejak runtuhnya Orde Baru dan memasuki masa demokratisasi, ormas Islam yang terhubung dengan jaringan transnasional tersebut secara terang-terangan menyebarkan dan melakukan aksi-aksi demonstrasi yang secara substantif bermaksud untuk mengubah ideologi pancasila dan menegakkan Negara berdasarkan khilafah islamiyah.

Dalam pandangan HTI Indonesia bukanlah negara yang sesuai dengan ajaran Islam. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dinilai masih belum mengakomodasi hakikat keislaman. Begitu juga nasionalisme atau cinta tanah air adalah bagian dari pengkotak-kotakan umat Islam di dunia (Afadlal, 2005, 137). Kelompok-kelompok ekstrimisme agama atau disebut juga fundamentalisme agama seperti ini pada umumnya memiliki visi untuk “menciptakan kembali dunia” yang dianggap telah menjauh dari syariat Islam (Tibi, 2000).

Oleh karena itu, HTI memiliki kecenderungan untuk menempatkan diri mereka di luar arus utama dan/atau menolak tatanan dunia, politik, dan sosial yang diatur dengan regulasi-regulasi hasil pemikiran manusia dan lebih dekat dengan konsep negara sekuler ala Barat. HTI adalah organisasi transnasional yang memiliki agenda terselubung dalam gerakan dakwahnya untuk menggulingkan tatanan politik negara bangsa (*nation state*) dalam rangka membangun



kembali tatanan politik berdasarkan konsep kekhilafahan. Agenda ini merupakan tahap ketiga dari strategi dakwah HTI yang banyak diajarkan kepada anggotanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Afadlal, dkk. bahwa dalam strategi dakwah HTI terdapat tiga tahapan dalam agenda dakwahnya. Pertama, tahap *taskif*, yaitu melakukan pembinaan dan persiapan bagi para kader. Usaha ini dilakukan melalui diskusi-diskusi kecil, pengajian, khutbah, dialog dengan tokoh, seminar, dan publikasi. Kedua, tahap *tafa'ul*, yaitu melakukan interaksi dengan masyarakat yang tujuan menyatukan langkah dalam menjaga integritas umat sebagai satu kesatuan. Dengan kata lain, usaha ini dilakukan untuk membangun jejaring (*networking*) atau menjalin persaudaraan (*ukhwah*) dengan berbagai kalangan. Ketiga, tahap pengambilalihan kekuasaan melalui jalan damai atau tanpa paksaan. Tahap terakhir ini akan dilakukan ketika ada penolakan terhadap syariat Islam sebagai pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara (Afadlal, 2005, 272).

Pandangan kelompok Ekstrimisme seperti HTI di atas tidak dapat dilepaskan dari konsep mereka dalam melihat agama. Meminjam konsep Islamisme yang digagas Bassam Tibi, HTI dapat dipandang sebagai kelompok Islamisme yang merupakan sebangkitan kembali Islam. Mereka pada dasarnya tidak menghidupkan kembali Islam, namun lebih

merekonstruksi Islam yang tidak sesuai dengan warisan sejarahnya. Islamisme ini tumbuh dari interpretasi spesifik atas Islam. Namun menurut Tibi apa yang dilakukan oleh kelompok Islamis itu bukanlah Islam yang sesungguhnya, karena itu merupakan ideologi politik yang berbeda dari ajaran agama Islam (Tibi, 2016, 1).

Dalam pandangan kelompok Islamisme atau ekstrimisme bahwa agama (*din*) dan negara (*daulah*) adalah satu kesatuan, karena itu mereka memiliki kecenderungan untuk mempromosikan tatanan negara berbasis syariat dan menentang negara bangsa seperti Indonesia yang dianggap sekuler karena mengadopsi sistem demokrasi yang dekat dengan konsep Barat. Menurut Tibi apa yang dilakukan oleh para Islamisme tersebut merupakan agenda politik yang diagamaisasikan, bukan agenda spiritual dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya (Tibi, 2016, 3). Pertanyaanya kemudian, apakah gerakan ekstrimisme agama yang memiliki agenda sosial-keagamaan dan politik seperti HTI berbahaya bagi tatanan sosial dan politik kebangsaan di Indonesia?

Ekstrimisme keagamaan selama hanya sebuah ideologi dan tidak menimbulkan tindakan konflik dan resisten terhadap keberadaan negara bangsa tidak perlu dihilangkan atau dilarang oleh negara. Namun, jika ekstrimisme agama sudah

mengarah pada tindakan kekerasan, terorisme, atau mengambil langkah-langkah yang mengarah pada resisten terhadap negara dengan agendanya untuk mengganti konstitusi, ideologi, dan sistem politik negara dengan ideologi khilafah seperti yang dilakukan HTI, maka ini perlu dilarang. Bagi HTI Sistem politik Indonesia sekarang dianggap sebagai *thogut*, karenanya harus diganti dengan sistem Islam atau khilafah. Kalangan ekstrimisme menjadikan isu ini sebagai ideologi yang harus mereka perjuangkan. Karena ini pula, pemerintah Indonesia membubarkan HTI yang dianggap sebagai organisasi terlarang yang mengusung ideologi ekstrimesme sebagaimana dimaksud. Pembubaran itu dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sebagaiman pengumuman yang dilakukan oleh Freddy Harris, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), tentang pencabutan badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu, 19 Juli 2017.

Menurut Kemenkumham terdapat 5 poin alasan terkait dengan pembubaran HTI. *Pertama*, Pembubaran HTI oleh pemerintah melalui Kemenkumham berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Kedua*, ormas HTI tercatat berbadan hukum

Nomor AHU-00282.60.10.2014 pada Juli 2014. *Ketiga*, pada 8 Mei 2017 pemerintah mengkaji keberadaan HTI dan memutuskan perlu mengambil langkah hukum terkait ormas yang mengusung pemerintahan berdasarkan khilafah itu. *Keempat*, perlunya merawat eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) berdasarkan UUD 1945. *Kelima*, surat keputusan pencabutan HTI dikeluarkan berdasarkan data, fakta, dan koordinasi dari seluruh instansi yang dibahas Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Susanto, 19 Juli 2017).

Berdasarkan lima alasan tersebut HTI yang merupakan organisasi pengusung ideologi ekstrimisme dibubarkan oleh pemerintah. Pembubaran HTI ini tentu memberikan peringatan (*warning*) kepada organisasi Islam lain yang tergolong berideologi ekstrimisme dan radikalisme untuk menyusun agenda dan langka pergerakan sosial-keagamaan dan politik mereka di Indonesia kedepan. Dalam konteks ini, penelitian ini hendak mengkaji gerakan sosial-keagamaan dan agenda politik HTI pasca pemberlakuan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut. Penelitian mengkaji apakah HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah masih menjalankan agenda dakwahnya, baik dalam ranah sosial, keagamaan maupun agenda politik. Jika melihat anggota HTI telah tersebar di seluruh penjuru

Indonesia khususnya pulau Jawa dan kuatnya ideologi Ekstrimisme, atau dalam bahasa Bassam Tibi disebut Islamisme, cukup kuat melekat dalam diri tokoh-tokoh dan anggota HTI memungkinkan bagi eks anggota organisasi ini akan tetap melakukan agenda dakwahnya secara diam-diam, atau menyusup dalam sejumlah kegiatan keagamaan dalam berbagai bentuk.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini penting disampaikan di sini guna memberikan pemahaman terkait agenda dakwah dalam bidang sosial-keagamaan (penyebaran doktrin ekstrimisme agama) dan agenda politik HTI sebagai organisasi terlarang pasca pemberlakuan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat. Upaya ini dilakukan sebagai bagian untuk mencegah meluasnya gerakan dakwah kelompok radikalisme-ekstrimisme dari eks anggota atau simpatisan HTI dalam menyebarkan ideologi dan agenda sosial-keagamaan dan politik mereka yang secara jelas-jelas mengancam eksistensi NKRI. Selain itu, juga menjadi bahan advokasi untuk merumuskan program-program deradikalisasi dalam rangka melawan agenda-agenda gerakan kelompok ekstrimisme dan radikalisme lain guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian tentang gerakan kelompok ekstrimisme-radikalisme yang mengambil studi kasus pada organisasi HTI ini dilakukan dengan berpedoman pada rumusan masalah berikut:

- 1) Bagaimana strategi gerakan dan agenda dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam bidang sosial-keagamaan dan politik di Indonesia pasca pemberlakuan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat?
- 2) Bagaimana langkah dan strategi pemerintah dalam menyikapi kemungkinan munculnya gerakan ekstrimisme dan radikalisasi yang dilakukan oleh eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)?

## **C. Signifikansi Penelitian**

Penelitian tentang gerakan kelompok ekstrimisme-radikalisme yang mengambil studi kasus pada organisasi HTI ini memiliki beberapa signifikansi berikut:

- 1) Hasil penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan wacana dan perdebatan terkait dengan isu-isu ekstrimisme dan radikalisme di Indonesia.

- 2) Hasil penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran terkait agenda dakwah dalam bidang sosial-keagamaan atau penyebaran doktrin ekstrimisme agama dan agenda politik dari HTI sebagai organisasi terlarang pasca pemberlakuan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat.
- 3) Hasil penelitian ini dapat menjadi *policy paper* (kertas kebijakan) bagi pemerintah dalam merumuskan strategi dan kebijakan deradikalisasi di Indonesia kedepan, khususnya terkait dengan pembinaan eks anggota HTI yang memiliki persebaran di banyak wilayah di Indonesia.

#### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Jurnal Tashwirul Afkar (2002) yang berjudul *Menggugat Fundamentalisme Islam* menjadi sebuah karya acuan dalam membahas tentang radikalisme dan ekstremisme dalam Islam. Fundamentalisme mempunyai pengertian dan definisi yang tidak berbeda dengan radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan praktik-praktik militansi dalam Islam. Karya ini terbilang lengkap dalam membahas terminologi fundamentalisme. Satu hal yang menjadi benang merah dalam karya ini adalah ideologi jihad yang diyakini sebagai hal paling mendasar dan utama dalam fundamentalisme Islam. Ideologi

jihad tersebut pun menjadi kata kunci yang mendorong terjadinya setiap praktik teror dan militansi dalam berbagai kelompok fundamentalis Islam. Ideologi jihad menciptakan musuh bersama yang harus dilawan, dan itu tidak hanya barat (non muslim), pun sangat mungkin kalangan muslim atau negara sendiri dengan segenap elemennya jika itu dianggap bertentangan dengan ideologi jihad yang mereka yakini. Dan seruan jihad masih dianggap sangat efektif untuk menyatukan kelompok-kelompok fundamentalis tersebut sehingga mereka tetap eksis. Realisasi dari ideologi jihad kelompok fundamentalis Islam salah satunya adalah mendorong pemberlakuan syariat Islam di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di berbagai daerah dengan basis Islam yang mayoritas dan dominan.

Karya bunga rampai yang berjudul *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (2005) melihat Islam radikal di Indonesia sebagai gerakan-gerakan Islam politik. Islam radikal yang sangat identik dengan gerakan-gerakan Islam politik dikonotasikan dengan terorisme karena konstelasi politik global. Islam politik merupakan sebuah ancaman nyata. Radikalisme di Indonesia uforianya dimulai pasca reformasi tahun 1998 dengan lahirnya berbagai ormas dan kelompok Islam garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI),



Laskar Jihad (LJ), yang dalam aktivitasnya sering memobilisasi massa secara masif untuk berbagai tujuan tertentu. Adapun radikalisme Islam di Indonesia yang identik dengan gerakan-gerakan Islam politik Indonesia dalam buku ini dibahas keterkaitannya dengan organisasi radikal Islam di berbagai negara Islam seperti: Ikhwanul Muslimin, Hizbullah, Hamas, dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana radikalisme Islam di Indonesia bermuara pada ideologi “khilafah” untuk mengganti bentuk dan dasar negeri Indonesia dengan ideologi negara Islam sebagaimana yang diperjuangkan oleh HTI ataupun MMI.

Bassam Tibi dalam karyanya *Ancaman Fundamentalisme Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru* (2000) sangat patut dijadikan acuan dalam membahas radikalisme Islam. Fundamentalisme dalam Islam yang juga sinonim dengan radikalisme Islam dianalisis dalam dua isu yang sangat penting: bahwa fundamentalisme Islam bukanlah Islam itu sendiri sebagai agama, dan fundamentalis Islam yang merupakan ideolog-ideolog kekuasaan yang harus diwaspadai karena dianggap jauh lebih berbahaya dibanding para ekstremis dan teroris dalam Islam. Fundamentalisme Islam dalam keyakinan Tibi tidak lain dan tidak bukan merupakan politisasi agama. Politisasi agama (Islam) menurutnya sifatnya global, dan kemudian mewabah ke seluruh dunia, tidak hanya

di negara-negara Islam atau yang berpenduduk Islam, tapi juga mencapai negara-negara non Islam yang kemudian mempengaruhi cara pandang negara tersebut akan agama Islam. Dan politisasi agama Islam yang masif tersebut salah satu eksekusinya adalah terorisme, ekstremisme, yang niscaya lantas mengkonstruksi pandangan minor dunia akan agama Islam.

### **E. Kerangka Teori**

Ekstremisme dan radikalisme agama dalam banyak literatur dimaknai beragam oleh para sarjana. Kata ekstremisme agama juga sering digunakan secara bergantian dengan kata radikalisme, islamisme dan fundamentalisme agama (Striegher, 2015). Namun, dalam penelitian ini, hanya akan sering menggunakan istilah radikalisme dan ekstremisme meski keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda. Dimana radikalisme agama adalah pemikiran dan tindakan beragama yang cenderung masih memiliki pemikiran yang sedikit terbuka (*open-minded*), sedangkan ekstremisme agama dimaknai sebagai pemikiran dan tindakan beragama yang tertutup dan memiliki kecenderungan untuk menggunakan kekerasan sebagai senjata untuk melawan pihak lain yang tidak sesuai dengan pandangan atau ideologi yang mereka anut (Schmid, 2013, iv). Namun, keduanya memiliki sikap yang

dinilai dapat mengantarkan pada tindakan yang mengancam orang lain dan termasuk mengancam tatan sosial dan politik yang dinilai skuler, karena dianggap dapat menjadi sumber pada tindakan terorisme (Masgono, 2009).

Tindakan ekstrimisme keagamaan ada dalam semua agama (Hindu, Budha, Islam, Katolik dan Protestan), namun dalam wacana global dan termasuk di Indonesia sendiri tindakan ekstrimisme agama lebih banyak dilekatkan pada agama Islam (Hasyim, 2016). Hal ini tidak dapat dilepaskan dari aktivitas kelompok-kelompok Islam radikal yang secara fulgar menunjukkan tindakan ekstrimisme agama di ruang publik Indonesia.

Radikalisme dalam Islam yang dipraktikkan oleh berbagai organisasi keagamaan Islam militan merupakan gambaran jelas mengenai konflik yang dibangun oleh kelompok tersebut *vis a vis* negara. Konstruksi konflik tersebut dibangun karena adanya anggapan yang kuat bahwa negara itu *thagut* (sistem *thagut*) yang ideologinya berseberangan dengan yang diyakini, bahwa negara selama ini melakukan praktik-praktik yang berpotensi akan melemahkan dan menghancurkan perjuangan mereka (Afadlal, 2005).

Dalam tradisi Marxisme relasi struktural antara negara dengan kelompok radikal Islam merupakan gambaran pertentangan dua kelas yang berbeda: kapitalis

direpresentasikan oleh negara sebagai elite (penguasa), sedang proletar sangat identik dengan kelompok radikal Islam. Posisi struktural mereka pun jelas bahwa negara sebagai superordinat berada pada struktur atas (*super structure*), sedang kelompok radikal Islam adalah subordinat yang niscaya ada pada struktur bawah (*base structure*). Keterbatasan potensi yang dimiliki oleh kelompok radikal Islam berusaha diimbangi dengan membuat aliansi (jaringan) antar kelompok yang berideologi sama dalam perjuangan melawan negara. Dan perjuangan kelas yang mereka lakukan dalam melawan negara melalui intimidasi, kekerasan, hingga menebar teror di masyarakat.

Fenomena radikalisme beberapa ormas Islam akan ditelaah melalui pendekatan sosial konflik menurut teori Marxisme. Struktur dan institusi sosial yang kuat dan kompleks seperti negara niscaya mengalami disfungsi sosial. Adanya disfungsi sosial sekecil apapun dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara cenderung akan mengakibatkan terjadinya konflik, baik horizontal ataupun vertikal. Konflik sosial yang terjadi dalam relasi antara ormas radikal Islam dengan negara berlangsung di masyarakat (horizontal), pun pada tataran institusional kelembagaan (vertikal).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dan pendekatan sosial konflik menurut teori Marxisme.

### **2. Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian dilakukan melalui beberapa metode diantaranya, sebagai berikut:

*Wawancara* akan digunakan sebagai bagian dari menelusuri data-data yang berasal dari narasumber-narasumber kunci yang dilakukan secara mendalam. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur agar keluwesan dan keeluasaan dalam mencari data tetap terjaga.

*Observasi Terlibat* digunakan untuk secara langsung melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dialami subyek penelitian/masyarakat yang diindikasikan berideologi ekstrimisme dan radikalisme agar mendapatkan data yang sedekat mungkin dengan realitas.

*Studi Dokumen* digunakan untuk melakukan analisis dan pembacaan atas dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan masalah penelitian dan dokumen-dokumen yang dapat membantu menjelaskan masalah penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengkonfirmasi atau sebagai pembanding,

atau penjelas data-data yang diperoleh dari wawancara dan observasi terlibat.

*Focus Group Discussion* digunakan untuk selain menggali data lebih banyak dari perspektif yang beragam juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi (membandingkan, memperjelas, memperdalam) data-data baik yang diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, maupun observasi terlibat.

### 3. Analisis Data

Analisis data penelitian ini setidaknya akan melalui tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilih dan memilah data, memusatkan perhatian dan penyederhaan data, abstraksi dan transformasi data-data yang muncul di lapangan terkait dengan gerakan anggota HTI dan JI dalam menjalankan agenda dakwahnya. Proses ini berjalan terus-menerus selama penelitian ini berlangsung untuk secara cermat melakukan penggolongan, penajaman, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data untuk tahap analisis berikutnya.

Tahap berikutnya dari analisis data adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk tertentu; naratif-deskriptif, matrik, bagan, jaringan, tabel dan sebagainya sehingga lebih mudah melihat apa yang terjadi di lapangan dan lebih memungkinkan dalam penarikan kesimpulan. Penyajian data ini termasuk juga kegiatan

memasukkan data-data yang dianggap relevan ke dalam bab-bab pembahasan.

Penarikan kesimpulan akhir dilakukan setelah semua tahap di atas dilalui, namun penarikan kesimpulan-kesimpulan kecil terjadi secara terus menerus selama proses penelitian ini berlangsung hingga mendapatkan suatu kesimpulan akhir yang kokoh dari keseluruhan hubungan data yang telah direduksi dan disistematiskan.

## **G. Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1) Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di tiga wilayah, yaitu Kota Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tiga wilayah ini dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut. Kota Jakarta adalah merupakan pusat dari aktivisme organisasi HTI berada, dan di wilayah ini pula HTI memiliki basis keanggotaan kelas menengah yang cukup tinggi, khususnya dari kalangan terpelajar, bila dibandingkan dengan wilayah lain. Jawa Barat, dalam hal ini wilayah Bogor, juga merupakan wilayah yang menjadi basis bagi anggota HTI, terlebih banyak tokoh-tokoh HTI yang tinggal di Bogor dan dari wilayah ini lah HTI lahir sebagai salah satu organisasi keagamaan yang memiliki ideologi radikal di Indonesia. Di wilayah ini pula HTI banyak mendapatkan pengikut dari komunitas pelajar khususnya

mahasiswa di IPB, bahkan salah satu pimpinan pusat HTI, Muhammad al-Khottot adalah alumni dari perguruan tinggi ini (Afadlal, 2005, p. 266). Sedangkan pemilihan wilayah Jawa Tengah, khususnya Kota Solo, adalah salah satu wilayah di Jawa Tengah yang basis bagi organisasi-organisasi ekstrimisme agama, termasuk anggota HTI. Namun, intensitas penelitian juga banyak dilakukan di Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah dan banyak dihuni oleh kalangan kelas menengah dan pelajar, yang memungkinkan diantara mereka memiliki banyak keterlibatan dengan organisasi-organisasi ekstrimisme seperti HTI.

## 2) Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Adapun rangkaian kegiatannya disampaikan pada tabel di bawah.

Tabel 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pra Lapangan																				
2	Pengambilan data di lapangan																				
3	Analisis data																				
4	Penyusunan laporan																				
5	Penyerahan laporan																				



## **BAB II**

### **HIZBUT TAHRIR INDONESIA: SEBUAH PROFIL ORGANISASI**

#### **A. Sejarah Singkat Hizbut Tahrir di Indonesia**

Hizbut Tahri Indonesia (HTI) jika dilihat dari namanya merupakan sebuah partai politik berazas Islam. Namun, di Indonesia organisasi ini lebih memilih untuk berada di luar sistem politik yang ada, sehingga ia lebih tepat disebut ormas. Secara geneologis HTI merupakan organisasi transnasional yang pertama kali berdiri dan berkembang di al-Quds Palestina pada 1953 dengan nama *Hizb al-Tahrir* (HT).

Berdasarkan pada sejarahnya, sebelum didirikan di Palestina, HT pernah mengajukan izin ke pemerintah Yordania melalui Departemen Dalam Negerinya sebagai partai politik. Namun, upaya itu ditolak, bahkan keberadaanya di negara tersebut dilarang karena sebagai organisasi yang ilegal (Abdurrahman 2005, 35-36).

Latar belakang berdirinya HT tersebut dipengaruhi oleh tumbuhnya keprihatinan atas terjadinya keterpurukan umat Islam dalam waktu yang panjang. Dimana sejak abad ke-19 M, peradaban Islam berada dalam keterpurukan dan kemunduran akibat dijajah dan didominasi oleh peradaban Barat melalui misi kolonialismenya. HT melihat bahwa meski banyak

Negara-negara Islam yang berusaha untuk menyelamatkan diri, namun bukannya kemenangan dan kejayaan, tetapi menurut HT yang ada umat Islam semakin mengalami keterpurukan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, tujuan dari didirikannya HT adalah untuk mengembalikan kejayaan dan kehidupan Islam. Satu-satunya cara menurut HT adalah dengan jalan dakwah dan jihad, dan ini hanya dapat dilakukan dengan tegaknya pemerintahan Islam berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam yaitu as-sunah dan al-Quran, dalam bentuk penegakan *khilafah Islamiyah* (al-Tahrir 2009, 27-28).

Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqi al-Din al-Nabhani (lazim dibaca Taqiyudin al-Nabhani). Kemudian setelah ia meninggal pada 1977 M. kepemimpinan HT dilanjutkan oleh ‘Abd al-Qadim Zallum, seorang tokoh yang berasal dari Palestina. Kepemimpinannya berlangsung sampai 2003, dan dilanjutkan oleh Atha’ Abu Rashthah, alias Abu Yasin, seorang tokoh yang berasal dari Palestina yang sebelumnya menjadi juru bicara HT Yordania. Ia dilantik pada 13 April 2003 oleh Dewan Mazhalim (Al-Amin 2012, 22). Diyakini bahwa Atha’ Abu Rashthah yang memegang komando HT hingga saat ini dari The West Bank. Ia didampingi oleh Khaled Hassan, seorang pendiri organisasi Fatah, merupakan salah satu faksi yang tergabung dalam Palestine Liberation

Organization dan tokoh spiritual HT yaitu Syeikh Assad Tamimi (Ali 2012, 85-90).

Adapun sejarah HT di Indonesia (kemudian disebut HTI) diawali dari interaksi Kiyai Abdullah bin Nuh, pemilik pesantren Al-Ghazali di Bogor, yang mengajak Abdurrahman Al-Baghdadi, seorang aktiis HT yang tinggal di Australia, untuk tinggal di Bogor sekitar tahun 1982-1983. Kemudian di saat-saat mengajar di pesantren milik Kiyai Abdullah tersebut, Abdurrahman banyak berinteraksi dengan para aktivis masjid dari Masjid Al-Ghifari yang ada di kampus IPB Bogor. Berawal dari sini lah pemikiran Taqiyudin al-Nabhani, pendiri HTI, mulai didiskusikan oleh para mahasiswa. Dalam perkembangannya dibentuklah halaqah-halaqah (forum diskusi atau pengajian kecil) untuk membahas dan mendiskusikan pemikiran-pemikiran HT yang ada dalam buku-buku yang dikarang oleh Taqiyudin al-Nabhani. Singkatnya, dapat dibilang bahwa para aktivis muda masjid kampus ini lah (khususnya aktivis mahasiswa masjid di IPB) yang kemudian menyebarkan gagasan-gagasan HT, termasuk putra Abdullah bin Nuh, yaitu Muhammad Mustofa, yang sejak lama menjadi aktivis HT sejak ia kuliah di Yordania (Arif 2018, 124). Kemudian dengan memanfaatkan Lembaga Dakwa Kampus (LDK), organisasi HT mulai menyebar di banyak kampus di Indonesia yang berada di luar Bogor, seperti IKIP, UNPAD,

UNDIP, UNAIR, bahkan juga banyak berkembang di kampus-kampus agama seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (khususnya pada fakultas-fakultas umum) dan kampus-kampus lain yang berada di luar Jawa, seperti UNHAS dan lainnya.

Perkembangan HT di Indonesia dapat dibilang cukup cepat dan mendapatkan pengikut yang relatif banyak dan menyebar di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Indonesia bagian Barat sampai Indonesia bagian Timur seperti Papua. Setelah menilai memiliki banyak anggota dan mendapat sambutan dari banyak kalangan, HT mengadakan konferensi akbar berskala internasional pertama kali di Indonesia pada 2002 yang bertajuk *Khilafah Islamiyah*. Kegiatan ini digelar di Istora Senayan yang menghadirkan banyak tokoh HT dari berbagai daerah dan internasional sebagai narasumber dalam acara tersebut. Kegiatan ini sekaligus menjadi petanda bagi lahirnya Hizbut Tahrir Indonesia, yang secara jelas-jelas mendeklarasikan diri sebagai organisasi partai politik dengan berazaskan Islam sebagai ideology organisasi. Namun, perlu dicatat bahwa HTI berbeda dengan partai Islam di Indonesia pada umumnya yang mengikuti kontestasi dalam pemilu dan/atau pilkada, HTI tidak pernah mau untuk masuk dalam sistem politik yang ada di Indonesia, karena itu ia menjauhkan organisasi dan anggotanya dari proses-proses politik electoral baik itu Pilpres, Pileg, maupun Pilkada (gubernur dan

kabupaten/kota). Penolakan ini merupakan bagian dari penolakan HTI atas system politik modern yang dinilai sebagai *toghut* yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang mereka pahami. Ini adalah bentuk baku dan pandangan umum dari Hizbut Tahrir dalam skala internasional.

Dalam konteks Indonesia, komando kepemimpinan HTI dipegang oleh Muhammad Al-Khattat, yang kemudian digantikan oleh Hafidz Abdurrahman. Sedangkan jurubicara HTI sejak dahulu dipegang oleh Ismail Yusanto. Berdasarkan penjelasan dari para narasumber HTI selain memiliki kepengurusan di tingkat nasional, juga memiliki kepengurusan di level daerah. Hampir sebagian besar daerah di Indonesia sudah terinfiltrasi gerakan HTI dan terbentuk suatu kepengurusan lokal. Namun, berbeda dengan HTI di level nasional yang memiliki kantor dengan terempel papan nama besar bertuliskan Hizbut Tahrir Indonesia, kepengurusan HTI di level daerah tidak memiliki papan nama yang menjelaskan kantor atau sekretariat organisasi. Pergerakan HTI di level daerah juga dilakukan dengan cara-cara yang tidak begitu terbuka sebagaimana organisasi-organisasi masyarakat/partai politik Islam lain. Penjaringan anggota baru HTI lebih banyak dilakukan melalui pemanfaatan jaringan telekomunikasi menggunakan handphone dan mengajak seseorang untuk ikut dalam kegiatan liqo-liqo yang diadakan oleh anggota HTI.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengidentivikasi atau menilai seseorang akan dapat diajak bergabung menjadi anggota HTI adalah dengan melontarkan suatu pertanyaan-pertanyaan pendek. Pertanyaan-pertanyaan itu seperti: jika diminta memilih antara Islam dan Pancasila, manakah yang akan kamu pilih? Menurut kamu, manakah yang lebih mulia dan unggul antara Islam dan Pancasila? Jika seseorang dalam menjawab kedua pertanyaan tersebut menjawab dengan memilih Islam dibanding Pancasila, maka bagi anggota HTI orang seperti ini memiliki peluang besar untuk dapat ditarik atau diajak masuk sebagai anggota HTI dengan mengajak berdialog dan mengundang dalam forum-forum diskusi kecil (*liqa'*) yang rutin diadakan oleh anggota HTI, yang umumnya diadakan di masjid-masjid kampus. Ini adalah salah satu strategi awal yang dilakukan oleh anggota HTI dalam merekrut orang lain (*outsider*) untuk menjadi bagian dari anggota HTI (*insider*), dan kebanyakan dilakukan secara tertutup.

Dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa sebelum HTI dibubarkan melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, perkembangan HTI sudah memasuki masa perjuangan marhalah kedua, yaitu *tafa'ul bil 'aam* (berinteraksi dengan publik). Pada fase ini, sasaran pengembangan anggota HTI yang *pertama*, adalah

dengan berusaha merekrut masyarakat umum yang tinggal di wilayah perkotaan. Dimana sasaran utama yang menjadi target untuk diajak bergabung ke dalam HTI adalah masyarakat muslim yang biasa beribadah di masjid-masjid utama (besar/jami') yang ada perkotaan di banyak daerah, mulai tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten dan kota. Dalam menarik umat Muslim untuk bergabung, HTI biasanya mengadakan halaqoh atau pengajian yang relatif besar untuk mengenalkan kepada publik tentang konsep atau gagasan-gagasan khilafah Islamiyah. Upaya ini dikumandangkan secara intens di banyak tempat. Bahkan tidak jarang HTI melakukan aksi demonstrasi secara terbuka yang digelar sebagai pertunjukan atas kekutan politik (*show of political forces*) mereka pada publik. Lazimnya kegiatan ini dilakukan sebagai respon atas kebijakan Negara yang dinilai tidak memihak kepada masyarakat dan memiliki peluang untuk digiring pada penawaran konsep khilafat atas kegagalan pelaksanaan system politik dan ekonomi modern ala Barat. Sebagai contoh, di saat ada kebijakan kenaikan harga BBM, kenaikan tariff dasar listrik, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya kasus korupsi, dan kasus tersilat lidah yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang berujung pada tuduhan atas penistaan agama, sampai pada kasus konflik yang terjadi di Suriah dan Palestina, maka HTI akan mengerahkan

massa/anggotanya untuk menjalankan aksi demonstrasi yang mengkritik dan mengutuk pemerintah Indonesia yang dinilai telah menjalankan kebijakan bertentangan dengan kepentingan rakyat, umat Muslim, dan Islam secara spesifik. Argument yang selalu mereka usung adalah bahwa masalah-masalah yang terjadi pada ini akibat pengadopsian system ekonomi dan politik neoliberal skuler yang jauh dari nilai-nilai agama Islam yang diajarkan dalam As-Sunah dan Al-Qur'an. Karena itu, solusi yang selalu HTI tawarkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah pentingnya menegakkan Negara khilafah Islamiyah.

Namun demikian, perlu disampaikan di sini bahwa dalam rangka pengembangan jumlah keanggotaan dan kekuatan politiknya, HTI tidak hanya menggunakan jalur dakwah di wilayah masyarakat perkotaan. Dari observasi langsung penulis, HTI juga sudah mulai menysasar kalangan masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Ini khususnya yang terjadi di wilayah-wilayah Jawa. Melalui acara-acara pengajian majlis taklim, kader HTI yang ada di level desa mengundang tokoh-tokoh seniornya yang mumpuni dalam bidang agama untuk mendakwahkan dan mengumandangkan pemikiran-pemikiran HTI. Melalui cara ini proses kaderisasi dari masyarakat pedesaan dijalankan.



Sedangkan jalur ketiga yang cukup intensif digarap HTI dalam rangka mengembangkan pemikirannya agar dipahami dan banyak diikuti oleh masyarakat adalah melalui kampus. Kaderisasi di kalangan mahasiswa merupakan instrument khusus yang sengaja didesain oleh HTI. Karena melalui pemuda yang ada di kalangan mahasiswa, gagasan dan ide-ide khilafah Islamiyah yang dikumandangkan HTI dinilai akan mudah menyebar dengan cepat. Faktanya memang demikian, kebanyakan kader HTI adalah dari kalangan anak muda terdidik dari kalangan mahasiswa, dan tidak jarang mereka adalah mahasiswa-mahasiswa dari fakultas umum seperti fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas biologi, fakultas kedokteran, dan yang fakultas-fakultas lain yang semisal. Mereka kebanyakan adalah anak muda yang tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren, jika pun pernah relatif sebentar, namun haus akan nilai-nilai religiusitas, atau dapat dikatakan sedang ingin menjadi pribadi yang saleh. Kondisi ini yang kemudian ditangkap oleh HTI untuk menjadi objek doktrinasi pemikiran keagamaan ala HTI yang berorientasi pada politik kekuasaan model khilafah Islamiyah.

Guna memperlancar agenda dakwah di kalangan mahasiswa dan melakukan penetrasi ide-ide khilafah Islamiyah, HTI membentuk organisasi *underbow* yang disebut dengan Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan. Organisasi

underbow HTI ini didirikan pada 2005. Dimana sistem kerja dan strategi kaderisasi anggota Gema Pembebasan yang ada di kampus-kampus juga bersifat tertutup sebagaimana HTI. Dengan kata lain, teknik kaderisasi dilakukan dengan menerapkan sistem sel, yang memungkinkan diantara organisasi Gema Pembebasan di setiap kampus untuk tidak saling mengenal. Karena itu, nama yang digunakan setiap Gema Pembebasan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh Gema Pembebasan di Jawa Barat berpusat di Masjid Ibnu Sina yang ada di Universitas Padjajaran, kemudian di UIN Bandung diberinama Lembaga Studi Politik Islam (LSPI). Sementara itu, di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), nama lembaga yang digunakan adalah KALAM. Kondisi ini sama juga dengan yang digunakan di ITB yaitu menggunakan nama Lembaga Studi Teknologi Islam (LSTI), dan seterusnya (Arif 2018, 80). Organisasi underbow HTI yang mewujud dalam Gema Pembebasan lebih cepat populer di kalangan mahasiswa di banyak kampus di Indonesia, apabila dibandingkan dengan organisasi *underbow* Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yaitu KAMMI yang sejak decade 1990 mendominasi kampus-kampus umum di bawah Menristek Dikti khususnya. Populeritas ini disebabkan oleh faktor kuatnya keislamanan dan menempatkan diri sebagai kelompok pergerakan mahasiswa yang kritis (Novianto 2007,

67-68), lebih-lebih pada kebijakan pemerintah Indonesia yang dinilai skuler, atau tidak dijalankan berdasarkan konsep khilafah Islamiyah ala HTI.

HTI sebelum di bubarkan termasuk organisasi politik dan keagamaan transnasional yang berkembang pesat di Indonesia pasca reformasi 1998. Setelah ditelusuri lebih dalam persebaran HTI telah menjangkau banyak daerah di Indonesia. Setidaknya pada daerah-daerah berikut persebaran HTI cukup dinamis, yaitu meliputi wilayah Jakarta, Bandung, Bogor, Banjarmasin, Bima (NTB), Solo, Semarang, Sampang, Gorontalo, Tulungagung, Balikpapan, Lampung, Luwu (Sulawesi Selatan), Palu, Purwokerto, Barabai (Kalimantan Selatan), Medan, Mojokerto, Majalengka, Makasar, dan Ngawi, Jawa Timur (Arif 2018, 126). Dengan menyebut daerah-daerah ini bukan berarti di wilayah lain tidak terjadi persebaran anggota HTI, namun hanya ingin menunjukkan bahwa di tempat-tempat tersebut HTI telah tumbuh lebih pesat dan mengalami geliat yang tinggi dibanding daerah-daerah lain.

Di ranah aktivitasnya, HTI juga aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menggambarkan fikrah dan thariqahnya. Aktivitas-aktivitas tersebut mencakup. *Pertama*, mengadakan kampanye kontra-deradikalisasi Islam. Kegiatan ini diadakan untuk meng-counter wacana deradikalisasi yang

digalakkan oleh pemerintah dan organisasi-organisasi Islam lain seperti NU dan Muhammadiyah guna menanggulangi terorisme. Bagi HTI, program-program deradikalisasi yang dijalankan oleh pemerintah pada dasarnya hanya upaya untuk menggembosi dan menghacurkan Islam dari dalam karena menilai seolah Islam telah menjadi sumber bagi aksi-aksi terorisme. Kampanye kontra-deradikalisasi ini digerakkan dalam kerangka besar Halaqah Islam dan Peradaban (HIP) yang diadakan HTI di beberapa tempat berikut: (1) di Solo, tempatnya di Gedung IPHI Baron Surakarta, melalui serangkaian seminar yang bertajuk “Membongkar Makar Deradikalisasi” yang diadakan pada 4 Desember 2011; (2) di Bandung, tepatnya di Gedung Ad-Dakwah melalui kegiatan seminar yang bertajuk “Proyek Deradikalisasi: Upaya Mengaborsi Kelompok Islamis” yang diadakan pada 27 November 2011; (3) di Bima, NTB, yang diadakan di Hotel La Illa melalui kegiatan seminar yang mengambil tema “Deradikalisasi Upaya Menggembosi Islam” yang diadakan pada 27 Desember 2011 (al-Wa’ie 2012, 36-37).

*Kedua*, kegiatan lain yang mencerminkan fiqrah HTI adalah dengan mengadakan Silaturahmi Akbar Keluarga Besar Hizbut Tahrir Indonesia dengan mengangkat tema “Peran Ulama dalam Menegakkan Khilafah, Negara Ideal yang Mensejahterakan.” Kegiatan besar ini pernah diadakan secara

berurutan pada tahun 2012 di berbagai tempat, diantaranya: di Ponorogo pada 1 September 2012, kemudian dilanjutkan di Mojokerto, Tulungagung, Lampung, Riau pada 2 September 2012. Acara yang sama kemudian dilanjutkan di Jombang pada 7 Desember 2012, kemudian di Sumedang, Bandung Raya, Banjar, Semarang, Penyambungan Sumatera Utara pada 9 September 2012. Dilanjut di Bogor pada 12 September 2012, Yogyakarta pada 13 September 2012, Banjarmasin dan Banjar Baru pada 14 September 2012, kemudian dilanjut di Ciamis, Purworejo, Solo, dan Lumajang pada 15 September 2012. Dilanjut di Kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Sukabumi, Banyumas, Madura, Palembang, Padang, Banua, Malang, Makasar, Kendari, Aceh, dan Pontianak pada 16 September 2012. Lanjut di Banyuwangi dan Pandeglang pada 22 September 2012, kemudian di Jember dan Medan pada 23 September 2012, dan terakhir diadakan di Jakarta pada 29 September 2012 (Tabloid 2012, 38). Dengan melihat luasnya bersebaran agenda silaturahmi akbar tersebut, menunjukkan bahwa agenda kampanye dan persebaran anggota HTI cukup luas, hampir di semua daerah di Indonesia ada. Ini juga menunjukkan bahwa HTI memiliki kekuatan politik dan sosial cukup besar dan tidak dapat disepelekan begitu saja. Meskipun saat ini sudah dibuparkan secara hukum, namun kemungkinan-kemungkinan geliat pergerakan HTI di banyak daerah tersebut

patut diwaspadai. Bagaimana geliat dan gerakannya pasca pembubaran? Ini akan dijawab pada bagian berikutnya laporan penelitian ini.

Kegiatan *ketiga* yang dilakukan HTI, adalah melalui sosialisasi gagasan *khekhilafahan* kepada tokoh-tokoh umat Islam. Kegiatan sosialisasi yang pernah diadakan HTI di Indonesia dalam rangka menyebarkan gagasan dan memperbesar anggota diadakan dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan berikut. (1) melakukan konferensi Tokoh Umat di Gedung Selecta Ballroom, Medan, pada tanggal 17 Juni 2012, dan pada hari yang sama juga melakukan kegiatan serupa di Lampung. (2) mengadakan diskusi tokoh umat yang mengambil tema “Khilafah Model Terbaik Negara yang Mensejahterakan” di Gedung Centra Media, Gorontalo pada tanggal 10 Juni 2012. (3) mengadakan sarasehan tokoh masyarakat yang mengambil tema “Sarasehan Tokoh Masyarakat: Khilafah Model Terbaik Negara yang Mensejahterakan” di kantor DPD II HTI Jember, Jawa Timur, pada tanggal 17 Mei 2012. (4) mengadakan seminar nasional dengan mengangkat tema “Khilafah Islamiyyah” di Gedung Taman Budaya, Bengkulu, pada tanggal 10 Juni 2012. (5) mengadakan tabligh akbar yang mengambil tema “Ulama dan Umat, Merindukan Tegaknya Syariah dan Khilafah” di

Lapangan Koramil Gunung Putri, Bogor, yang diadakan pada 10 Juni 2012 (Al-Wa'ie 2012, 36-39).

*Keempat*, HTI mengadakan serangkaian kegiatan yang menunjukkan penentangannya terhadap isu-isu nasional dan/atau internasional yang dinilai bertentangan dengan Islam atau umat Islam dalam perspektif HTI. Kegiatan ini seperti: (1) dialog anta ulama dengan mengangkat tema “Peran Ulama dalam Pencegahan Kemungkaran Khususnya tentang Kondomisasi” yang diadakan di Kantor DPD II HTI Kota Bogor pada tanggal 29 Agustus 2012; (2) penolakan perpanjangan kontrak Freeport hingga 2041 di Papua, melalui penerbitan Media Umat, edisi Freeport Perampok, Kontrak Belum Habis Minta Perpanjangan Hingga 2041, Edisi 88 September 2012. Majalah Umat edisi ini merupakan kritik HTI terhadap dominasi AS yang berada di balik Freeport. (3) HTI mengadakan rapat akbar di Bogor dalam rangka menolak arogansi GKI Yasmin dan Makar kafir penjajah pada 27 November 2011; (4) HTI melakukan pengecaman terhadap tindakan represif pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasin Banglades atas aktivis Hizbut Tahrir di Jakarta pada 9 Desember 2011; (5) HTI melakukan demonstrasi dalam rangka penolakan terhadap “Separatisme Papua” di Bundaran HI Jakarta pada tanggal 13 Desember 2011; (6) HTI melakukan aksi solidaritas terhadap Muslim Rohingya di beberapa tempat,

seperti di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Medan, dan Cirebon pada bulan Juli – Agustus 2012; dan hingga (7) mengadakan aksi penolakan atas pembangunan Kedubes AS di Jakarta pada 31 Juli 2012 (Al-Wa'ie 2012, 36-37).

*Kelima*, HTI membentuk Forum Musliman untuk Peradaban (Formuda) yang digerakkan oleh Muslimah HTI (MHTI) dengan menerapkan isu khilafah dalam persoalan keperempuanan, keluarga, dan kesehatan ibu. Agenda ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya: (1) Bina Syakhsyiyah Islamiyah (BSI) yang pernah diadakan di Masjid Agung Bogor dengan mengangkat tema “Khilafah Islamiyah Menjamin Kesehatan Ibu Seutuhnya” pada tanggal 20 November 2011. (2) Mengadakan dialog intelektual aktivis kampus (Dialektika) ke-7 dengan mengangkat tema “Wujudkan Sejarahmu Sendiri: Kejatuhan Kapitalisme dan Kebangkitan Khilafah Islam” di Gedung TVST, ITB pada tanggal 27 November 2011. (3) Kemudian juga mengadakan sarasehan Muslimah dengan mengangkat tema “Membangun Ketahanan Keluarga Muslim dari Ancaman Leberalisasi” di Aula Dinas Kesehatan Tulungagung pada 11 Desember 2011. (4) mengadakan Diskusi dengan mengangkat tema “Telaah Kritis Masalah Kesehatan di Indoensia” di Aula Universitas Ichsan, Gorontalo pada 27 November 2011, dan (5) Mengadakan diskusi dengan tema “Perempuan Terpelajar terhadap Kebangkitan Umat” di



Pondok Pesantren Darul Hikmah, Lampung pada 12 November 2011 (Arif 2018, 128-129).

*Keenam*, HTI mengadakan halaqah remaja dengan menggunakan pendekatan training dan motivasi. Kegiatan ini meliputi: (1) Training Isnpirasi Remaja Muslimah dengan mengangkat tema “ The Real Avatar, The Real Solution for All” di Gedung YPAC Solo pada tanggal 27 November 2011. Kemudian (2) HTI juga mengadakan Training Remaja Islam dengan mengangkat tema “Menjadi Remaja Super dengan Islam demi Islam” di Aula SMK PGRI 2 Karawang pada 11 Desember 2011. (3) HTI mengadakan Daurah Jelajah Kampus dengang mengangkat tema “You Are the Special One, Andai Mengenal-Mu Lebih Dekat dan Muslimah 3 C (Cantik, Cerdas, Ceria) di Musholla Iqra USU, Medan pada 15 Juli 2011, dan (4) HTI mengadakan training remaja dengan mengangkat tema “Menjadi Muslimah Super” di Kantor DPD II HTI, Ngawi pada 21 Juli 2012 (Arif 2018, 129).

*Ketujuh*, HTI juga melakukan kunjungan kelembagaan ke instansi-instansi seperti instansi kepolisian, pemerintah daerah, dan pesantren. Aktivitas ini pernah dilakukan melalui kunjungan ke Mapolres Banyumas pada 23 Juli 2012, ke Polres Pati pada 12 Juli 2012, ke Polres Depok pada 4 Juli 2012, ke Polres Sampang pada 28 November 2011, ke Polres Pamekasan pada 23 Mei 2012, dan ke Polres Surakarta pada 26

Juli 2012. Kemudian kunjungan lain juga dilakukan ke pemerintah daerah Kota Bogor pada 6 Juni 2012, ke Kementerian Agama Kota Semarang pada 28 Mei 2012, Ke MUI Karawang pada 8 Juni 2012, dan ke Pesantren Darul Abror, Purbalingga pada 9 Juni 2012 (Arif 2018, 129).

Dari segenap aktivitas dan/atau kegiatan yang berurutan dan terorganisasi selama tahun 2011-2012, memberikan penjelasan bahwa HTI telah mengintensifkan tahap perjuangan *marhalah tafa'ul ma'al ummah*, yaitu tahapan sosialisasi gagasan Hizbut Tahrir kepada masyarakat umum dan termasuk instansi-instansi pemerintah. Ini adalah bagian dari upaya HTI mencari dukungan dan sekaligus mencari massa atau anggota baru untuk diajak bergabung ke dalamnya. Karena semakin banyak memiliki anggota, maka akan semakin memiliki dukungan masa yang besa dan memiliki kekuatan politik dan social besar pula, sehingga mudah bagi HTI untuk menegakkan misinya. Begitu juga kegiatan kunjungan HTI ke beberapa instansi pemerintah dan pesantren merupakan strategi merangkul berbagai kalangan yang memiliki kekuasaan atas otoritas politik, social dan budaya. Ini dilakukan agar HTI semakin memiliki dukungan dari berbagai pihak untuk melancarkan perjuangannya menegakkan khilafah Islamiyah ala HTI.

## **B. Pemikiran Politik Hizbut Tahrir**

Pemikiran politik Hizbut Tahrir (HT) tidak dapat dipisahkan dari caranya memahami Islam. Bagi HT Islam dipahami tidak saja sebagai agama (*adhiin*), melainkan sebagai sebuah ideologi, atau disebut *mabda'*. Pemahaman ini yang kemudian menggiring gerak perjuangan HT sangat bersifat politis dan tujuannya selalu bersifat kenegaraan. Dengan memahami Islam tidak sekedar agama, melainkan sebagai sebuah ideology, konsekuensinya adalah akidah Islam tidak hanya diyakini sebagai agama yang mengandung sejumlah ajaran yang menuntun manusia untuk taat pada aturan-aturan keimanan kepada Tuhan untuk mencapai kehidupan ukhrawi, tetapi juga mengandung ajaran-ajaran yang menuntun manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia, termasuk mengatur kehidupan social politik kenegaraan.

Dalam konteks pemahaman di atas, HT memahami ideology sebagai suatu keyakinan yang didasarkan pada rasionalitas dalam memahami ajaran-ajaran agama untuk menghasilkan aturan-aturan bagi kehidupan manusia di dunia. Di sini makna akidah yang didasarkan pada rasionalitas tersebut adalah pemikiran yang komprehensif tentang alam, manusia, kehidupan, serta kaitannya dengan sebelum kehidupan dunia dan setelahnya. Adapun aturan yang berasal dari akidah sendiri adalah berupa solusi untuk mencegah

problem kehidupan manusia, cara penyelesaiannya, serta upaya penjagaan dan penyebaran ideology tersebut (Arif 2018, 135).

Dari pemahaman di atas Nampak jelas bagaimana HT menempatkan pemaknaan yang sama antara akidah dan ideology. Dalam artian, akidah dimaknai sebagai seperangkat aturan komprehensif mengenai tata kehidupan. Aturan kehidupan ini kemudian dipahami secara rasional, sehingga membuahkan proses pelaksanaan aturan tersebut. Katan antara akidah dan rasionalitas ini memang menjadi pola piker kegamaan yang ada didalam HT, karena pada dasarnya mereka lebih menekankan peran kunci akal-pemikiran bagi keberislaman. Yang demikian ini lahir dari suatu keyakinan akan Islam sebagai agama pemikiran, sehingga akal menjadi asas dalam Islam itu sendiri.

Menurut Arif (2018, 135-136) bahwa penahbisan HT atas konsep Islam sebagai “agama pemikiran” ini terkait dengan pola gerakan HT yang bersifat *qiyadah fikriyah*. Dalam artian, kepemimpinan terhadap masyarakat yang dilandaskan pada akal pemikiran. Dalam konteks ini, HT memandang pemikiran yang melandasi kepemimpinan organisasinya ini adalah pemikiran yang tercerahkan (*al-fikr al-mustanir*). Yaitu sebuah pemikiran mendalam dan komprehensif atas persoalan mendasar umat Islam, serta kemampuan menawarkan solusi bagi persoalan tersebut. Pemikiran yang tercerahkan ini

merupakan tahapan tertinggi dari dua macam pemikiran di bawahnya, yaitu pemikiran mendalam dan pemikiran yang dangkal. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah yang dimaksud dengan pemikiran yang tercerahkan itu? Menurut Arif bahwa sepertinya klaim atas ketercerahan pemikiran ini disandarkan pada refleksi HT terhadap kehancuran Islam setelah runtuhnya Khilafah Turki Usmani pada tahun 1924. Di atas puing kehancuran ini, HT kemudian menemukan solusi berupa kebangkitan kembali khilafah Islamiyah yang coba dibangun secara global untuk mengembalikan Islam pada posisi yang jaya dan disegani dunia. Ini lah mungkin yang dimaksud dengan ketercerahan pemikiran tersebut, yang kemudian digerakkan sejak dalam pemikiran Islam hingga gerakan politik.

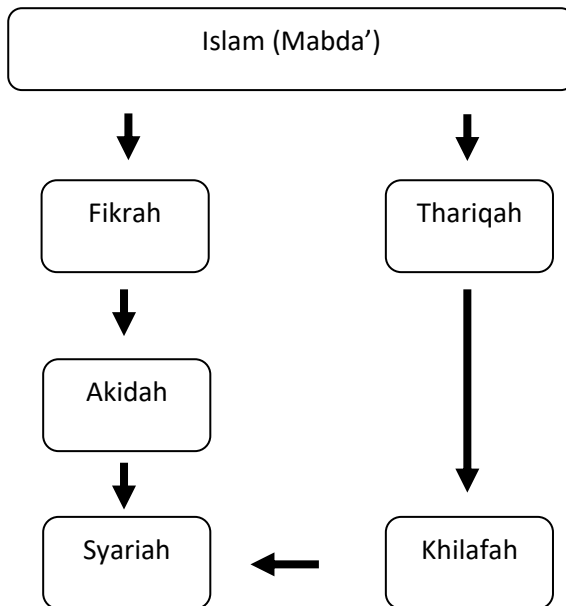
Pada titi ini, kemudian Islam sebagai ideologi melahirkan dua pemahaman keislaman sebagai definisi operasional dari ideologi tersebut. Dimana Islam dipahami sebagai fikrah (pemikiran) dan Islam sebagai *thariqah* (metode). Sebagai fikrah, Islam memiliki akidah dan syariah yang menyediakan aturan-aturan bagi kehidupan manusia di dunia yang diturunkan langsung oleh Tuhan melalui ajaran-ajaran yang ada dalam kitab suci al-Qur'an dan al-Hadits. Di dalam fikrah ini pun HT mencoba melakukan pemilahan antara akidah dan syariah. Jika akidah merupakan aturan dasar

tentang ketuhanan atas kehidupan dan pola keimanan seorang muslim atas aturan itu. Maka syariah dipahami sebagai operasionalisasi aturan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, HT menyebut syariah sebagai akidah rasional (*'aqidah 'aqliyyah*), karena posisinya yang merasionalisasikan aturan dasar dari akidah Islam itu sendiri. Dalam posisi ini akidah dan syariah menyediakan prinsip-prinsip dan aturan-aturan rasional yang menempatkan Islam, terutama sebagai pemikiran, sehingga Islam akhirnya bersifat rasional, meskipun konsep rasionalitas yang dipahami HT tetap disubordinatkan di bawah sumber-sumber hukum, yaitu al-Qur'an, al-Hadist, Ijma' shahabat dan qiyas (Arif 2018, 136).

Sedangkan yang dimaksud dengan *thariqah* dalam konsepsi HT adalah metode untuk mewujudkan aturan di dalam akidah dan syarah itu sendiri. Thariqah ini yang mendorong HT sebagai sebuah gerakan politik, sebagai kendaraan untuk menegakkan syariat Islam melalui khilafah Islamiyah. Pada posisi thariqah ini lah, pendirian daulah khilafah Islamiyah merupakan puncak dari penegakan syariah, karena menurut HT tanpa melalui khilafah, maka syariah tidak akan pernah bias diterapkan secara kaaffah, atau sempurna. Oleh karena itu, khilafah Islamiyah akhirnya menjadi bagian penting dari mabda' Islam. Dengan kata lain, tanpa menempatkan Islam sebagai mabda', maka khilafah Islamiyah

tidak akan mampu ditegakkan kembali sebagaimana ada dalam sejarah Islam. Rumusan Islam sebagai mabda' dapat dipahami lebih lanjut dari bagan di bawah ini.

### **Bagan 2.1 Islam Sebagai Mabda'**



Sumber: Arif (2018, 137)

Dari bagan tersebut di atas menunjukkan bahwa khilafah adalah prasyarat penting dan *qonditio sin quo non* bagi penegakan syariat Islam dalam kehidupan umat manusia. Maka dari itu, status atau usaha pendirian khilafah itu menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim, karena tanpanya upaya

penegakan syariat Islam di muka bumi ini menjadi sesuatu yang mustahil. Menurut Arif, dalam kaitan ini, HT menggunakan kaidah ushul *ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib* dalam memahami penegakan khilafah. Bahkan HT tidak sampai di situ, karena pada pemikiran lain HT memberikan bobot kewajiban syar'u pada khilafah sebagai satu-satunya metode atau thoriqah yang abash secara sar'i yang harus diwujudkan terlebih dahulu demi penegakan dan perwujudan syariah dalam kehidupan umat Muslim. Pada konteks ini lah HT menyebut khilafah sebagai jalan dan metode syariah yang paling utama dalam Islam (*al-thoriqah al-syariah al-wahidah*).

Dalam upaya mendirikan dan menegakkan kembali khilafah sebagai thariqah untuk menegakkan syariat Islam, HT memiliki beberapa landasan pemikiran yang bersifat filosofis, normative, dan historis. Landasan filosofis ini terkait erat dengan kerangka pemikiran yang mendasari pemikiran politik HT yang merujuk pada pendirian kembali khilafah. Sedangkan landasan normative terkait dengan dasar-dasar hokum (Islam) dari khilafah yang didasarkan pada teks kitab suci al-Qur'an dan al-Hadist. Adapun landasan historisnya adalah berkaitan dengan praktik kekhilafahan yang pernah terjadi dalam sejarah Islam yang memberikan gambaran berkaitan dengan era dimana khilafah Islamiyah itu mengalami puncak yang

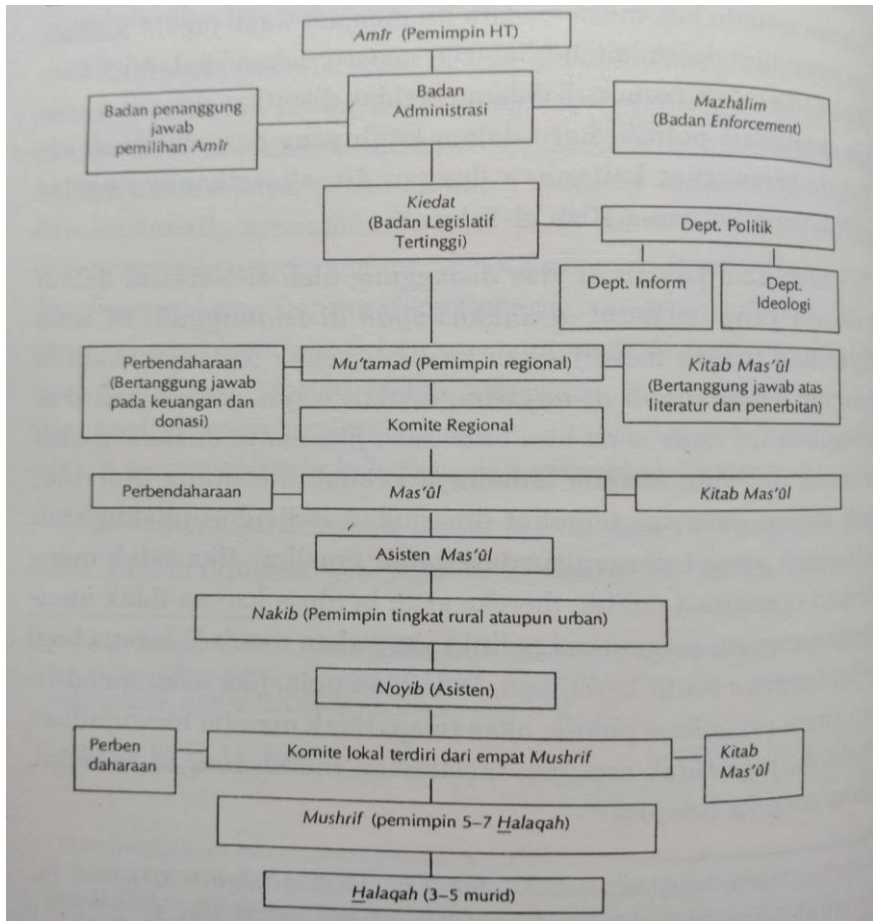


kemilang dan kebesarannya. Ini setidaknya di masa-masa awal Islam sampai abad pertengahan.

### **C. Struktur Partai Politik Hizbut Tahrir**

Hizbut Tahrir sebagai organisasi partai politik (namun tidak masuk dalam sistem kepartaian) memiliki struktur organisasi yang mirip dengan jaringan bersistem sel rahasia dengan cara kerja pengorganisasian dan pengontrolan yang baik. Dimana setiap sel dikomandani oleh seorang pemimpin dengan tiga atau tujuh anggota. Pemimpin sel ini juga mempunyai seorang atasan, atau pemimpin lagi. Karena itu data anggota hanya diketahui oleh sedikit kolega mereka yang ada di dalam sel saja, dan hanya pemimpin sel yang mengetahui atasannya. Dapat dibilang bahwa tingkat kerahasiaan pengorganisasian HTI telah membuat intelijen Negara mengalami kesulitan untuk melakukan penetrasi terhadap gerakan politik yang dilakukan oleh HTI. Berikut gambar struktur organisasi HTI sebagaimana disampaikan pada Tabel di bawah.

**Tabel 2.1 Struktur Partai Politik Hizbut Tahrir**



Sumber: Al-Amin (2012, 34)

Perlu diketahui bahwa puncak hirarki kepemimpinan di tubuh partai politik HT adalah seorang amir yang berbasis di Yordania. Dibawah amir terdapat tiga lembaga, yaitu badan

administrasi, badan mazhalim, badan paenanggung jawab pemilihan amir. Badan-badan ini adalah bagian yang paling rahasia dalam organisasi. Badan administrasi dan amir akan memilih anggota utama dari HT untuk membentuk keidat (qiyadah), yaitu suatu komite kepemimpinan. Menurut aturan administrative HT, qiyadah memiliki tugas untuk memimpin partai, mengadminstrasi, mengawasi, dan mensupervisi seluruh perkembangan aktivitas partai. Selain itu, qiyadah juga mempunyai hak eksklusif untuk mengamademen konstitusi partai dan penegakan kedisiplinan atas penyimpangan yang dilakukan anggota partai. Qiyadah juga mempunyai departemen politik yang akan mengumpulkan informasi atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia serta model respons yang perlu dilakukan sebagai bimbingan terhadap umat Islam (Al-Amin 2012, 35).

Untuk sementara ini markas besar gerakan ini diyakini berada di Yordania, sedangkan markas HT di Londong bertugas mengawasi seluruh aktivitas di negara-negara muslim termasuk HT Indonesia. Kepemimpinan hizbut tahrir terus berupaya memperhatikan pemimpin-pemimpin cabang nasional HT yang ada di seluruh dunia, serta mengarahkan aksi-aksi mereka dengan menyediakan dana, materi-materi pendidikan, dan kebutuhan organisasi yang lain. Qiyadah di London juga memberikan perintah-perintah kepada semua

anggota HT untuk mengadakan demonstrasi-demonstrasi anti-pemerintah.

Level lanjutnya yang ada di tubuh organisasi partai politik Hizbut Tahrir adalah para mu'tamad (pemimpin regional) yang bersama-sama dengan qiyadah bertanggung jawab mengawasi masalah-masalah politik dan aktiviatas partai di "provinsi" dimana mu'tamad berada. Dalam struktur ini mu'tamad membawahi tiga kelompok supervise, sel yang bertanggung jawab terhadap partai dalam bidang keuangan dan donasi, sel yang bertanggung jawab pada masalah pengumpulan informasi dan publikasi, dan mu'tamad juga memimpin rapat pertemuan komite regional, yang waktunya sudah ditentukan oleh amir. Mu'tamad ini dipilih oleh amir dari salah seorang komite regional dengan masa tugas dua tahun. Sementara itu, komite regional dipilih oleh anggota-anggota daerah. Pemilihannya disebut intikhab yang diadakan setiap dua tahun pada bulan Muharam (Al-Amin 2012, 36).

Level selanjutnya adalah mas'ul (pemimpin atau penanggung jawab di bawah mu'tamad). Mas'ul mempunyai badan yang bertugas mengurus keuangan dan donasi, serta badan yang bertanggungjawab terhadap pengumpulan informasi dan publikasi. Pada level ini, selebaran-selebaran HT diproduksi dengan isu-isu yang sesuai dengan masalah local yang terjadi di setiap Negara. Selebaran-selebaran seperti ini

seperti banyak di temukan di masjid-masjid jami' Indonesia sebelum HTI di bubarkan. Dimana selebaran ini juga mempunyai fungsi untuk melakukan penyebaran informasi dengan harapan menjadi instrument untuk melakukan rekrutmen anggota baru HT. Dalam contoh di Eropa, isu asimilasi dan elienasi sering dimunculkan. Sedangkan di Tumur Tengah, isu penyalahgunaan migas, dan di Asia Tengah masalah perbedaan social ekonomi. Tugas mas'ul di sini tidak hanya terkait dengan pengorganisasian anggota saja, namun juga penguasaa keilmuan, baik fiqh, tafsir, maupun hadits, karena mas'ul adalah merupakan tempat rujukan bagi para anggota Hizbut Tahrir. Selain itu, mas'ul juga memiliki deputi-deputi yang berhubungan dengan naqib (pemimpin HT di perkotaan dan pedesaan). Dibawah mas'ul yang merupakan pangkalan dasar HT, yang tersusun dari komite local dan lingkaran studi, disebut halaqah. Masing-masing komite local diketuai oleh seorang naqib yang ditunjuk oleh komite provinsi. Naqib mengatur koite dan berkomunikasi dengan komite provinsi.

Lebih lanjut, naqib juga mempunyai deputi yang disebut noyib (naib/wakil atau nayib/bagian) yang bekerja dengan komite local yang terdiri dari empat mushrif (pembimbing yang melakukan indoktrinasi anggot di dalam halaqah). Komite local mengawasi proses indoktrinasi halaqah. Mushrif

membina lima atau tujuh halaqah yang terpisah satu sama lain. Masing-masing halawah terdiri dari tiga atau tujuh anggota tergantung kebutuhan kerahasiaannya. Halaqah biasanya diadakan seminggu sekali seteka bekerja atau setelah studi yang bertempat di rumah anggota halawah, dimasjid, atau di tempat-tempat lain yang kerahasiannya terjaga. Mereka akan mengikuti regulasi khusus dan program pendidikan tertentu. Oleh karena itu, untuk menjaga tingkat kerahasiaan kepentingan organisasi secara maksimal dan baik, maka tidak ada komunikasi antar sel-sel yang ada dalam tubuh Hizbut Tahrir. Di dalam aturan HT, hanya da beberapa cara untuk berinteraksi dengan sel yang lebih tinggi, dan sesame sel tidak ada yang selevel. Oleh karena itu, masing-masing anggota HT saling berkomunikasi dengan yang lain dengan menggunakan nama samara atau suatu nama ketika masuk menjadi anggota. Jika salah seorang anggota tidak merasa senang dengan mushrif, maka dia dapat menulis surat dan meminta kepada mushrif untuk mengirimkan surat kepada tingkat yang lebih tinggi. Kemudian tingkat yang lebih tinggi ini yang akan memberi solusi (Al-Amin 2012, 38).

Dalam struktur organisasi HT, komite local seringnya turun ke lapangan untuk mengawal halaqah guna memastikan integritas ideology mereka sebagaimana dicetuskan oleh Taqiyyudin al-Nabhani. Jika salah seorang anggota dicurigai

oleh anggota yang lain, mushrif atau supervisor lain bias mengadakan halaqah tersendiri bagi individu yang dicurigai tadi. Strategi ini biasanya digunakan untuk pegawai pemerintah atau militer yang mengikuti kegiatan halaqah yang diadakan oleh hizbut tahrir. Dalam konteks ini pula, mushrif harus membuat laporan kepada komite local dalam seminggu sekali atas perkembangan halaqah secara keseluruhan, atau perkembangan individu, atau calon. Komite local HT yang sudah dianggap mempunyai pengetahuan tentang doktrin, misi, dan filosofi partai adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menerima atau menolak calon anggota baru yang akan masuk kedalam hizbut tahrir (Al-Amin 2012, 38). System kerja organisasi Hizbut Tahrir seperti ini juga yang diterapkan di Indonesia. Suatu system yang sangat rapi dalam bekerja mengatur organisasi termasuk melakukan rekrutmen anggota baru. Karena itu banyak kegiatan-kegiatan HTI di Indonesia yang tidak tercium atau diketahui oleh pihak inteligen negara. Bias dikatakan bahwa pembubaran HTI sendiri dilakukan setelah melihat aksi-aksi demonstrasi HTI dan statemen<sup>2</sup> yang ada dari para anggota atau pimpinan di media social atau youtube. Selain itu, ada beragam faktor politik juga masuk di dalam proses itu.





### **BAB III**

## **AGENDA SOSIAL POLITIK HTI PASCA DIBUBARKAN**

### **A. Pembentukan Wacana di Media Daring (*Online*)**

Di jaman sekarang tidak ada yang tidak terhubung dengan internet. Kemunculan internet melandasi lahirnya media baru (*new media*) yang notabene sangat berbeda dengan media lawas (*mainstream*). Eriyanto (2018: 197-199) menyebut terdapat dua perubahan besar dengan kemunculan internet. *Pertama*, komunikasi massa sebagai sebuah institusi. Konsep awal mengenai media massa selalu terkait dengan institusi baik surat kabar, radio, televisi, buku, film, rekaman musik, dan lain sebagainya. Dan institusi komunikasi massa semacam ini niscaya membutuhkan modal besar dan pengelolaannya melibatkan massa yang banyak. Kehadiran internet praktis mengubah pandangan dan konsep mengenai institusi komunikasi massa tersebut. Institusi komunikasi massa dengan demikian sudah tidak relevan lagi ketika setiap orang mampu berkarya dengan memanfaatkan internet tanpa harus melalui institusi-institusi komunikasi yang tentu saja sangat birokratis. Sebut saja YouTube sebagai sebuah media sosial (*medsos*) yang eksis dengan keberadaan internet sudah

“mengentaskan” banyak orang dengan karya-karya kreatif mereka yang dipopulerkan melalui YouTube tanpa melalui institusi komunikasi massa konvensional.

Adapun perubahan *kedua* ialah internet mengubah konsep mengenai *gatekeeping*. Untuk diketahui *gatekeeping* ialah proses pemilihan dan seleksi bahan berita sebelum disajikan kepada khalayak. Internet memungkinkan orang untuk memperoleh informasi tentang segala sesuatu dari berbagai sumber secara cepat tanpa terkendala oleh ruang dan waktu. Bahkan orang pun kemudian tidak hanya bisa membuat informasi serupa, pun sangat mungkin mengubah konten beritanya menjadi informasi yang salah, lantas mendiseminasikannya secara masif. Khalayak tidak lagi pasif di era digital sekarang ini. Internet semakin menegaskan bahwa khalayak memiliki kebebasan untuk memilih ragam berita dan informasi yang diinginkannya sendiri. Bahkan khalayak bisa, mengomentari, mencela, dan mengkritisi secara langsung berita dan informasi yang sekiranya salah. Terdapat relasi interaktif antara khalayak dengan media yang merupakan sumber berita. Khalayak tidak perlu lagi menunggu pilihan dan seleksi berita dari dapur redaksi media tertentu. Internet dewasa ini menempatkan khalayak sebagai produsen dan kreator berita melalui *citizen journalism* (jurnalisme warga).

Terkait dengan keberadaan internet sebagai sebuah teknologi digital baru, Krekovic (2003) mengungkapkan bahwa jaringan-jaringan komunikasi baru yang terkoneksi dengan internet, merupakan satu dari sekian banyak perangkat yang mampu memaparkan secara radikal berbagai model baru dari produksi budaya, manajemen, dan distribusi informasi. Teknologi digital baru yang berbasis online sekarang ini membuat perubahan yang begitu fundamental dalam diseminasi informasi, yang mulai menggantikan cara-cara tradisional manusia dalam berkomunikasi. Media sosial menjadi contoh yang sangat jelas bagaimana manusia sekarang ini berkomunikasi di ruang-ruang digital.

Internet memungkinkan komunikasi dilakukan secara langsung melalui berbagai cara, baik audio atau visual bahkan penggabungan dari keduanya sekaligus sebagaimana TV. Namun dengan internet kita bahkan bisa mengakses TV sekalipun. Internet bersifat multimedia. Dan berbeda dengan TV komunikasi dengan internet sangat mungkin terjadi secara interaktif. Sebagaimana diungkap oleh Andriadi (2017: 3) dalam kaitannya dengan teknologi digital bahwa internet membuat proses komunikasi dilakukan secara interaktif, komunikasi dua arah. Dua orang bisa bercakap-cakap seakan berhadap-hadapan, padahal berada di dua lokasi yang berjauhan.

Internet bisa menjangkau siapapun dan dimanapun. Para pengguna internet pun tidak perlu saling mengenal satu sama lain (anonim). Bahkan identitas dalam komunikasi virtual sangat mungkin palsu. Tidak salah jika kemudian Mesch (2009) menyebut bahwa dengan “menjadi online” tidak hanya membebaskan diri dari batasan-batasan geografis, pun membebaskan diri dari batasan-batasan yang terasosiasi dengan kepribadian nyata sehari-hari dan peran-peran sosial kita. Menjadi online adalah menjadi bukan diri kita yang sebenarnya. Senada dengan itu maka dalam analisisnya, Sugihartati (2014: 62-63) Castells mengembangkan pemikirannya tentang masyarakat informasional dengan mengacu pada lima karakteristik dasar teknologi informasi, yakni (1) informasi merupakan bahan baku ekonomi; (2) teknologi informasi memiliki efek luas pada masyarakat dan individu; (3) teknologi informasi memberikan kemampuan pengolahan informasi yang memungkinkan logika jaringan diterapkan pada organisasi dan proses ekonomi; (4) teknologi informasi dan logika jaringan memungkinkan fleksibilitas yang jauh lebih besar, dengan konsekuensi bahwa proses, organisasi, dan lembaga dengan mudah dapat diubah dan bentuk-bentuk baru terus menerus diciptakan; (5) teknologi individu telah mengerucut menjadi suatu sistem yang terpadu.

Sangat banyak manfaat dari internet sebagai sebuah media baru dibanding dengan media mainstream.

Segala kelebihan internet sebagai sebuah media baru, dan berbagai platform medsos yang muncul karena adanya internet, adalah sebuah instrumen yang efektif dan efisien dalam mendiseminasikan sebuah pesan dan informasi. Dalam kasus HTI internet sungguh dimaksimalisasi fungsinya sebagai saluran ‘dakwah’, sebuah praktik yang selalu berusaha dipublikasikan ke khalayak baik melalui tulisan-tulisan di berbagai situs (website) miliknya ataupun organisasi yang berafiliasi dengannya. Selain itu juga melalui postingan status dan gambar ataupun video di berbagai medsos baik oleh eks pengurus ataupun anggota dan simpatisan HTI.

Berdasarkan data situs dataweb.org, terdapat 66 website berita yang berdiri sejak tahun 2000 – 2011. Republika merupakan media pertama yang dipublikasi di dunia maya pada tahun 1995. Setelah itu disusul tempointeraktif.com di tahun yang sama, selanjutnya kompas cyber media dan detik.com pada tahun 1998, sedang okezone.com yang merupakan perusahaan media di bawah MNC Group muncul pada tahun 2006, dan vivanews.com muncul pada tahun 2008. Khusus untuk media daring Islam, situs Alexa.com menyebut saat ini terdapat 51 website dengan beragam jenis kategori, mulai berita hingga tanya jawab. Website berita Islam

terbanyak pengunjung adalah [republika.co.id](http://republika.co.id). Jika menggunakan kategori “media online umum” website tersebut berada di urutan ke 60. Peringkat kedua situs Islam adalah [dakwatuna.com](http://dakwatuna.com), peringkat 191 untuk kategori umum, peringkat ketiga diduduki oleh [arrahmah.com](http://arrahmah.com), peringkat ke 232 untuk umum, peringkat keempat ditempati oleh situs berita [eramuslim.com](http://eramuslim.com), peringkat ke 264 untuk kategori umum, dan peringkat kelima diduduki oleh [voa-islam.com](http://voa-islam.com), peringkat ke 316 untuk kategori umum (Dja’far, 2018: 241-242).

Berdasar atas hasil survei dari APJII (2017) trend pengguna internet dari tahun ke tahun di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Sebagaimana hasil survei tersebut pada awal survei tahun 1998, jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 0,5 juta pengguna. Sejak saat itu mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Hanya pada tahun 2006-2007 jumlah pengguna internet sama, yakni sebanyak 20 juta pengguna di Indonesia. Sampai tahun 2017 lalu jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 143,26 juta pengguna.

Mayoritas pengguna internet di Indonesia ada di kalangan penduduk usia 19-34 tahun dengan persentasenya mencapai 49,52%. Sedangkan jumlah pengguna internet terbesar kedua adalah mereka yang berusia sekitar 35-54 tahun dengan tingkat persentasenya adalah 29,55%. Sedangkan kalangan anak (remaja) dengan rata-rata usia antara 13-18 tahun berada pada

tingkatan ketiga pengguna internet terbanyak di Indonesia, dan prosentasenya mencapai 16,68%. Usia di atas 54 tahun lebih merupakan pengguna internet terendah di Indonesia yang diperkirakan prosentasenya mencapai 4,24%. Dari data tersebut ternyata diketahui pengguna internet terbesar di Indonesia adalah mereka yang berada di tataran usia produktif dan merupakan pemilih aktif. Para mahasiswa termasuk dalam rentang usia 19-34 tersebut. Pengguna internet terbesar termasuk berasal dari kalangan mahasiswa tidak mengherankan karena internet merupakan salah satu media saluran mahasiswa yang sangat mendukung aktivitasnya di kampus.

Internet diakses dengan berbagai macam perangkat gawai di Indonesia. Sebanyak 92,8 juta jiwa atau sekitar 69,9% orang di Indonesia mengakses internet dengan handphone. Sedang internet rumah menjadi nomer dua dengan jumlah sekitar 17,7 juta jiwa atau sekitar 13,3% pengguna (APJII, 2016). Dari data di atas kita bisa menyebut bahwa internet sudah sangat banyak diakses oleh masyarakat Indonesia. Ini menjadi bukti penegasan bagaimana internet sebagai sebuah media baru menganggangi media-media konvensional, terutama media cetak yang sudah banyak gulung tikar.

Adapun internet paling banyak dimanfaatkan untuk layanan percakapan (*chatting*) yang prosentasenya sebesar

89,35%. Sedang pemanfaatan internet untuk medsos tidak terlalu besar perbedaan persentasenya meskipun memang masih di bawah layanan *chatting*, yakni sebesar 87, 13%. Sedang layanan mesin pencari (*search engine*) menempati posisi ketiga dengan kisaran persentase sebanyak 74,84%. Aplikasi layanan percakapan tersebut diantaranya adalah WhatsApp, Line, Facebook Messenger, dan lain sebagainya.

Layanan chatting WhatsApp menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan menghimpun 1,5 miliar pengguna aktif bulanan (*monthly active users/MAU*). Angka tersebut dilaporkan meningkat 14 persen dibanding MAU WhatsApp pada bulan Juli 2017 lalu yang berjumlah 1,3 miliar. Sedang pengguna harian WhatsApp (*daily active users/DAU*) berada di kisaran 1 miliar (<https://tekno.kompas.com/read/2018/02/01/09270377/pengguna-aktif-bulanan-whatsapp-tembus-15-miliar>, diunduh tanggal 1 Oktober 2018). Data di atas juga dikuatkan dari hasil survey yang dilakukan oleh situs *dailysocial.id* yang mengungkapkan bahwa sebanyak 97,24% dari responden pernah menggunakan WhatsApp, dan sebanyak 61,81% menyebut bahwa WhatsApp adalah aplikasi *mobile instant messaging* yang paling sering digunakan. Sedang aplikasi chatting lainnya adalah LINE yang jumlah persentase penggunaanya sebanyak 88,49%, BBM sebanyak 85,82%, dan FB Messenger dengan jumlah



prosentase pengguna sebanyak 77,26% (<https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-survey-instant-messaging-2017>, diunduh tanggal 1 Oktober 2018).

Pasca dibubarkan oleh pemerintah beragam tanggapan di medsos mengenai kasus pencabutan status hukum HTI tersebut. Ternyata *silent majority* menanggapi positif langkah pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana dilaporkan oleh Salim dalam situs seword.com (<https://seword.com/sosbud/repson-warga-medsos-terhadap-pembubaran-hti-80-positif>, diunduh tanggal 1 November 2018), sebanyak 80% netizen sangat setuju dengan pencabutan status hukum HTI, hanya 12% netizen yang mencela langkah yang dilakukan oleh pemerintah, sedang sisanya 8% netizen menyatakan sikap netral terhadap pembubaran HTI tersebut. Bila medsos dan media daring merupakan representasi dari masyarakat Indonesia pada umumnya, maka jumlah prosentase dari mereka yang setuju dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya sama menyetujui kebijakan pemerintah tersebut. Yang menarik kemudian adalah bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh HTI melalui eks pengurus dan anggota serta simpatisannya di medsos, dan termasuk juga melakukan infiltrasi dalam berbagai ormas dan gerakan-gerakan keislaman (dakwah) dan pengajian.

## **B. Manipulasi Wacana Melalui Medsos**

HTI bukan merupakan sebuah ormas biasa, melainkan sebuah partai politik. Wawancara dengan para tokoh HTI – eks HTI karena sudah dicabut badan hukumnya – dan simpatisan-simpatisannya umumnya tidak secara tegas dan jujur mengaku HTI sebagai sebuah partai politik atau setidaknya gerakan politik. Mereka umumnya mempunyai jawaban seragam bahwa HTI adalah murni organisasi dakwah. Sebagaimana diungkap oleh salah seorang eks anggota HTI.

“HTI merupakan organisasi dakwah yang setahu saya mendefinisikan dirinya sebagai *qutlah siyasah* atau partai politik atau lebih tepatnya sebagai pergerakan politik” (wawancara dengan Fendy, tanggal 21 Agustus 2018).

Hal senada juga diutarakan oleh Suteki, yang mendefinisikan HTI sebagai sebuah organisasi dakwah, atau lebih spesifik sebagai ormas Islam.

“Jika dilihat dari AD/ART maka HTI adalah organisasi dakwah dan keberadaannya pun dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang. HTI sama dengan organisasi non pemerintah, Non Government Organization (NGO) atau civil society, dan organisasi-organisasi ini sebagai penyangga untuk berlangsungnya apa yang kita sebut sebagai

masyarakat madani dengan prinsip equalitas, tidak ada subjek-objek. HTI lebih spesifik disebut sebagai ormas Islam.” (wawancara dengan Suteki, tanggal 14 Agustus 2018).

Dengan demikian HTI memang awalnya mengakui diri mereka sebagai sebuah gerakan dakwah namun di satu sisi juga mengakui bahwa gerakan dakwah yang mereka lakukan merupakan gerakan politik. Dan selama ini anggota HTI juga mengetahui bahwa HTI merupakan sebuah partai politik (*qutlah siyasah*). Dakwah merupakan strategi HTI dalam rekrutmen dan pengkaderan anggotanya. Dengan strategi dakwah pun HTI mensyiarkan faham khilafah diantara anggota dan simpatisannya serta umat. Karena dengan strategi dakwah tersebut maka sangat sering HTI menyitir ayat-ayat Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad saw untuk pembenaran klaim mereka. Strategi dakwah ini juga memungkinkan HTI untuk mengidentikkan dirinya sebagai organisasi keIslaman, karenanya kemudian tidak heran di setiap kegiatan dakwahnya HTI membawa simbol-simbol agama seperti bendera, dan lain sebagainya.

HTI dalam upaya mereka untuk melegitimasi klaimnya terhadap sistem *khilafah* sebenarnya tidak mempunyai landasan (hukum) yang kuat, bahkan dari Al-Quran ataupun Hadist sekalipun. Konsep *hukumah* (pemerintahan) dan *daulah*

(negara) tidak ada sama sekali dalam Al-Quran ataupun Hadist. Namun HTI selalu berupaya untuk menyebarkan berbagai ayat Al-Quran dan Hadist yang diyakini sebagai landasan untuk penegakan sistem *khilafah*. Hal tersebut menjadi bagian dari strategi politik HTI yang oleh mereka sendiri dianggap sebagai bagian dari dakwah. Dengan menyitir berbagai ayat Al-Quran dan Hadist yang dimanipulasi begitu rupa sesuai dengan tafsir mereka, dan dengan menyalahkan tafsir lain – kemudian disebar di media daring seperti medsos. Medsos yang merupakan sebuah media baru menjadi sarana yang efektif untuk mempublikasikan faham-faham tersebut.

*Khilafah* menjadi faham yang diperjuangkan oleh HTI bukan merupakan suatu hal yang aneh karena HTI menganggap Islam adalah sebuah ideologi yang tidak semata-mata diterapkan di ranah politik pun dalam seluruh sendi kehidupan. Pandangan semacam ini oleh para ahli juga disebut sebagai Islamisme. Dalam konsep Islamisme, Islam diyakini harus menentukan segala bidang kehidupan, karenanya menganggap pentingnya mendirikan sebuah negara Islam atau sebuah negara dengan sistem Islam (*khilafah*). Inilah tujuan utama dari organisasi HTI: mendirikan sebuah negara Islam (*khilafah*) atau formalisasi hukum-hukum pemerintahan dan kenegaraan dengan sistem Islam (syariah).

Fakta-fakta banyak tersebar di berbagai media mengenai wajah asli HTI yang sangat anti akan demokrasi namun satu sisi sangat memanfaatkan sistem demokrasi. Dengan ideologi khilafah yang diusungnya HTI jelas-jelas mempertentangkan ideologi Pancasila – bahkan ingin mengganti Pancasila dengan khilafah – yang sudah menjadi kesepakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Namun HTI memang selalu tidak mau mengakui penolakannya terhadap ideologi Pancasila. HTI dalam setiap kesempatan bertindak manipulatif, berlaku lainnya bunglon. HTI selalu mengatasnamakan Islam dan umat Islam dalam setiap kegiatannya.

Untuk syiar dan strategi dakwah yang lebih maksimal maka media baru atau media daring pun dilirik oleh HTI. Bagaimana HTI mendiseminasikan ideologi khilafah dan nilai-nilai mengenai kekhilafahan sebagai sebuah sistem pemerintahan dan negara di internet dan berbagai platform medsos menggambarkan mereka sangat melek akan teknologi baru ini. Secara insitusional HTI juga memiliki portal berita – meskipun website resmi HTI [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id) sudah diblokir pasca pencabutan status hukum HTI – ataupun akun-akun medsos HTI, termasuk pengurus-pengurus inti HTI serta simpatisan dan anggota HTI lainnya. Berikut bagaimana Ismail Yusanto selaku jubah HTI mengkonfirmasi mengenai ditutupnya situs resmi HTI yang disebutkan sudah ditutup

praktis setelah pemerintah mengumumkan pembubaran HTI dengan dicabutnya status badan hukum HTI. Dalam bahasanya pemerintah disebut menutup situs yang sudah ditutup, karena sebelum pemerintah menutup atau memblokir situs tersebut, HTI sendiri sudah menutupnya mendahului pemerintah (<https://news.detik.com/berita/d-3570772/hti-sebelum-diblokir-kami-sudah-tutup-situs-secara-mandiri>, diunduh tanggal 20 Oktober 2018). Melalui berbagai domain website dan medsos tersebut HTI pun mampu menyikapi setiap dinamika sosial politik di Indonesia. Di medsos sendiri para simpatisan dan anggota HTI semakin gencar melakukan protes dan membela sistem khilafah pasca pembubaran badan hukum HTI oleh pemerintah melalui Perppu No 2 tahun 2017 lalu.

Dalam studinya, Dja'far (2018: 204-206) mengungkapkan bahwa jalur-jalur transmisi ide-ide Islamisme setidaknya melalui tiga jalur. *Pertama*, gerakan-gerakan sosial. pada ranah ini transmisi ide dibawa oleh pelajar atau mahasiswa yang belajar di Timur Tengah. *Kedua*, jalur pendidikan dan dakwah. Lembaga-lembaga dan beberapa orang dari negara Timur Tengah, termasuk Mesir dan Kuwait, belakangan ini cukup aktif berkiprah di bidang pendidikan dan dakwah di Indonesia. Agen-agen tersebut adalah atase kebudayaan negara-negara Timur Tengah tersebut, organisasi-organisasi Islam internasional, atau lembaga amal non

pemerintahan. *Ketiga*, jalur publikasi dan internet. melalui sejumlah media baik cetak maupun daring, atau buku-buku dalam versi Arab maupun terjemahan, juga menjadi salah satu jalur transmisi yang cukup efektif. Media daring tampaknya semakin masif dimanfaatkan oleh HTI dalam berdakwah ataupun menyebarkan ideologi khilafahnya.

Apa yang diungkap oleh Dja'far sebagai jalur-jalur penyebaran Islamisme di atas tampaknya sama dengan tiga tahapan dakwah HTI. Adapun tahapan *pertama* adalah tahap pembinaan dan pengkaderan yang dilaksanakan untuk merekrut dan membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode HTI. Tahap *kedua*, ialah tahapan berinteraksi dengan umat yang bertujuan agar umat ikut memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai persoalan utamanya, agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan. Tahap *ketiga*, ialah tahapan penerimaan kekuasaan yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia (Burhan, 2017). Sebagaimana sejarah awal kemunculan HTI di Indonesia yang bermula dari kegiatan-kegiatan dakwah kecil dari kalangan mahasiswa di kampus, rekrutmen dan kaderisasi HTI pun berawal dari dunia akademik kampus. Semakin maraknya penggunaan gawai di kalangan anak muda, termasuk di kalangan mahasiswa,

menjadi salah satu modus perekrutan anggota oleh HTI atau setidaknya mendakwahkan faham-faham yang dianutnya kepada mahasiswa. Internet dimanfaatkan untuk mempromosikan identitas kelompok, sebagai sebuah media untuk berdakwah dengan menyebarkan faham-faham *khilafah*.

Proses indoktrinasi melalui kegiatan dakwah dimulai oleh HTI dari kampus. Para mahasiswa menjadi sasaran dan penggerak utama dakwah HTI. Adapun cara HTI dalam mengindoktrinasi para pengikutnya di kampus dilakukan melalui dua metode sebagaimana hasil reportase yang dilakukan oleh kumparan.com. *Pertama*, secara langsung melalui kegiatan HTI cabang kampus, dan *kedua*, membangun afiliasi dengan cara menempatkan kader-kader mereka pada jabatan strategis di lembaga dakwah kampus (LDK) (<https://tirto.id/cara-dakwah-hti-memikat-pengikut-dan-simpatisan-di-kampus-cs9d>, diunduh tanggal 10 Oktober 2018). Di banyak kesempatan Ismail Yusanto sendiri mengakui bahwa kampus dan ruang publik kampus dimanfaatkan oleh HTI untuk kegiatan pengkaderan dan dakwah. Kegiatan-kegiatan pengajian sengaja digelar oleh HTI di kampus-kampus selain untuk kaderisasi pun merekrut anggota-anggota baru HTI.

Tampaknya internet dan medsos yang di satu sisi merupakan produk *thogut* dan selalu dikecam oleh HTI, tapi di



sisi yang lain internet dan medsos dijadikan sebagai instrumen gerakan politik, ini hanya mengindikasikan satu hal bahwa HTI sangat sadar media daring atau virtual dewasa ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Internet sudah menjadi kebutuhan mendasar manusia. Sebagaimana hasil survei dari APJII mengenai durasi penggunaan internet. Prosentase penggunaan internet setiap hari mencapai 65,98%. Sedangkan prosentase jumlah pengguna internet dalam kurun 0-1 hari sebesar 10,46%. Prosentase pengguna internet selama 1-3 hari diperkirakan sebesar 13,90%. Dan prosentase penggunaan internet selama 4-6 hari sebesar 9,66% (APJII, 2017). Dengan demikian maka bisa dibilang bahwa sebagian besar orang menghabiskan waktunya setiap hari dengan internet atau memanfaatkan internet setiap harinya.

Senada dengan hasil survei dari APJII di atas, menarik menilik hasil survei yang dilakukan oleh Alvara Research Center. Menurut data dari Alvara Research Center sebanyak 83,4 persen penduduk Indonesia berusia antara 17-25 tahun mengakses internet. Sebanyak 23 persen diantaranya tergolong pecandu internet karena mengakses internet lebih dari tujuh jam dalam sehari. Dan ketika melakukan survei ditemukan bahwa sebagian generasi milenial atau generasi kelahiran akhir tahun 1980an dan awal tahun 1990an, setuju dengan konsep khilafah sebagai bentuk negara. Diakui memang mayoritas

milennial masih memilih NKRI sebagai bentuk negara, namun ada sekitar 17,8 persen mahasiswa dan 18,4 persen pelajar yang setuju khilafah sebagai bentuk negara ideal. Berbeda dengan kalangan profesional yang menyetujui ideologi Islam sebagai ideologi negara adalah sebanyak 15,5 persen. Meskipun mayoritas dari kalangan generasi milenial dan mahasiswa masih menyetujui NKRI sebagai bentuk negara namun prosentase diantara mereka yang menyetujui konsep khilafah sebagai bentuk negara cukup mengkhawatirkan dan patut diwaspadai. Alvara Research Center juga menambahkan bahwa paparan konservatisme dan radikalisme di kalangan milenial tak lepas dari konsumsi internet yang sangat tinggi dari kelompok usia yang lahir pada era 1990an tersebut. Kalangan generasi milenial inilah yang sebenarnya sasaran dari paham-paham konservatisme dan radikalisme seperti HTI apalagi mereka merupakan generasi yang sangat identik dengan internet.

Dalam berbagai kesempatan HTI tidak jarang memberikan komentar dan jawaban atas setiap konstelasi politik di Indonesia melalui media daring. Meskipun demikian para anggota dan simpatisan yang tidak menjadi bagian dari struktur formal kepengurusan HTI tidak bisa diabaikan perannya di medsos, mereka niscaya mempunyai peran yang signifikan dalam mendiseminasikan dan membela paham

kekhilafahan melalui akun-akun medsos yang mereka miliki. Bahkan jika mengacu pada data di atas mengenai frekuensi sehari-hari pemanfaatan internet di kalangan penduduk Indonesia sangat tinggi, maka bukan tidak mungkin proses rekrutmen anggota baru yang tertarik pada HTI dan ideologi khilafah efektif dilakukan melalui medsos atau media daring dari hasil interaksi para pengguna internet (*internet user*) atau biasa disebut sebagai netizen tanpa harus bertemu dan saling bertatap muka terlebih dahulu diantara mereka.

Berikut secara spesifik hasil survei terkait medsos. Situs We Are Social dan Hootsuite melansir data hasil survei yang dilakukan olehnya dengan mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia sangat menggemari medsos. Dilaporkan sebanyak sekitar 130 juta masyarakat Indonesia aktif di medsos, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Selain itu disebutkan bahwa per Januari 2018 jumlah total penduduk Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa. Tingkat penetrasi internet di kalangan masyarakat Indonesia yang berjumlah sekian mencapai 132,7 juta pengguna. Dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 97,9% pengguna internet di Indonesia juga sudah menggunakan medsos. Sedang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, maka sekitar 48% penduduk Indonesia sudah memanfaatkan medsos. Ditambahkan bahwa sekitar 120 juta

pengguna medsos atau sekira 92% pengguna mengakses medsos dengan perangkat gawai. Adapun media sosial yang paling banyak diakses atau digunakan di Indonesia adalah YouTube dengan tingkat prosentasenya sekitar 43%. Sedangkan Facebook menempati urutan kedua dengan jumlah prosentase sebanyak 41%. Aplikasi percakapan WhatsApp berada di urutan ketiga dengan prosentase sekitar 40%, dan dibawahnya terdapat Instagram dengan jumlah prosentase penggunaanya sekitar 38%. Aplikasi percakapan LINE berada di urutan kelima dengan prosentase pengguna sekitar 33% (Laksana, 2018; dalam <https://techno.okezone.com/read/2018/03/13/207/1872093/ini-jumlah-total-pengguna-media-sosial-di-indonesia>; katadata.co.id, diunduh tanggal 14 Oktober 2018).

Data hasil survei dari situs we are social dan Hootsuite di atas dikuatkan dengan laporan hasil survei dari situs dailysocial.id yakni diketahui bahwa Facebook sebagai salah sebuah platform medsos menjadi yang paling populer dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam mendapatkan informasi. Adapun jumlah prosentase masyarakat Indonesia yang memanfaatkan Facebook sebagai medsos untuk mencari informasi adalah sebanyak 77,76%. Aplikasi WhatsApp berada di bawah Facebook dengan prosentase sebanyak 72,93%, dan diikuti di tempat ketiga adalah Instagram dengan jumlah

prosentasenya sebesar 60,24%. Adapun LINE berada di urutan keempat dengan prosentase sebanyak 32,97%. Dan medsos yang menempati urutan kelima adalah Twitter dengan tingkat prosentase sebanyak 21,70%. Urutan tiga besar, yakni Facebook, WhatsApp, dan Instagram, semuanya adalah milik korporasi Facebook Inc. Bukanlah suatu yang mengejutkan jika ketiga platform medsos tersebut menjadi yang terpopuler di Indonesia.

Dinamika sosial politik di Indonesia yang melibatkan HTI akhir-akhir merupakan bukti sah bagaimana efektifnya medsos dalam setiap pergulatan wacana. Sehingga tidak heran bila HTI dan pemerintah serta pendukungnya masing-masing memanfaatkan media daring khususnya medsos untuk saling serang di setiap kesempatan.

Setiap kejadian di masyarakat yang bisa dijadikan sebagai instrumen perlawanan terhadap pemerintah dimaksimalkan begitu rupa oleh HTI terutama melalui media daring khususnya medsos. Sebagaimana insiden pembakaran bendera HTI pada perayaan hari santri nasional (HSN) tanggal 22 Oktober yang lalu. Peristiwa tersebut menjadi momen tepat bagi HTI untuk melawan balik pemerintah sekaligus menggalang aspirasi masyarakat apalagi insiden tersebut berlangsung pasca dikeluarkannya Perppu Nomer 2 tahun 2017 yang mencabut status hukum HTI. Medsos menjadi instrumen

perlawanan yang begitu masif dan cukup efektif untuk mengkonstruksi suatu wacana, atau setidaknya menggiring opini umat Islam bahwa kalimat tauhid dalam wujud bendera tauhid Arroyah tidak dihormati bahkan dihina begitu rupa dengan cara dibakar sambil bernyanyi-nyanyi.

### **Meme 3.1. Insiden Pembakaran Bendera HTI**



Sumber: [mediapembebas.com](http://mediapembebas.com)

Organisasi HTI melalui eks pengurus ataupun anggota-anggota dan simpatisannya semakin gencar mewacanakan di media daring terutama medsos setelah terjadinya insiden pembakaran bendera HTI oleh Barisan Ansor Serbaguna (Banser) HSN tanggal 22 Oktober lalu. Sangat tampak bagaimana kemudian pihak HTI memanipulasi berita bahwa yang dibakar oleh Banser adalah bendera tauhid, panji Rasulullah. Opini lantas tergiring pada isu pelecehan terhadap kalimat tauhid, penghinaan terhadap Rasulullah, zalim terhadap umat Islam, dan lain sebagainya. Bahkan yang terang kemudian adalah nuansa politis dari aksi-aksi pengecaman terhadap pembakaran bendera HTI tersebut yang kemudian digaungkan di medsos sebagai aksi bela tauhid. Karena merupakan tahun politik, menjelang pemilihan presiden (Pilpres), semakin jelas bahwa opini yang sengaja digiring di medsos adalah untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon (paslon) calon presiden dan wakil presiden (Capres-cawapres) dan memenangkan paslon Capres-cawapres lainnya.

Ibrahim (2011: 210) berpendapat bahwa media bisa dijadikan saluran apa saja: yang baik maupun yang buruk, yang benar maupun yang salah. Media misalnya bisa mengingatkan orang akan bahaya krisis, konflik, dan kekerasan, tetapi media juga bisa menempatkan krisis sebagai komoditas berita dan mementaskan perang seperti halnya

drama atau bahkan telenovela. Gambaran media khususnya medsos di tanah air tercermin dalam uraian Irianto yang mengatakan bahwa medsos tidak jarang mengabaikan unsur kepatutan, etika, moral, dan edukasi, dalam menyebarkan berita. Berita palsu yang membangkitkan kemarahan, hasutan, kebencian, dan kemudian melahirkan sentimen-sentimen etnis dan agama justru dijadikan daya tarik medsos selama ini (Irianto, 2017: 27). Dan berita-berita semacam itu memang sedang laku ditawarkan oleh medsos kepada khalayak.

Konstruksi wacana dari insiden pembakaran bendera HTI tersebut dikemas dengan sangat pintar oleh HTI di medsos untuk menggalang massa umat Islam melawan pemerintah yang berdaulat. HTI niscaya mafhum bahwa tahun ini adalah tahun politik menjelang Pilpres tahun 2019. Dari peristiwa tersebut HTI memposisikan dirinya sebagai pihak yang terdzalimi, mengalami diskriminasi oleh penguasa. HTI mewacanakan kelompoknya sebagai umat muslim yang tersubordinasi yang berusaha melawan dan membela kalimat tauhid dalam wujud panji Rasulullah Arroyah terhadap pihak-pihak yang berada pada posisi superordinat (penguasa) yang mendukung pembakaran bendera tersebut.

Oknum pembakar bendera HTI adalah anggota Banser, yang mana Banser seperti kita ketahui merupakan organisasi yang berada di bawah naungan organisasi keagamaan



Nahdlatul Ulama (NU). Dan NU merupakan organisasi keagamaan *ahlussunnah wal jamaah* terbesar yang ada di Indonesia. Sebagai organisasi keagamaan dengan basis massa umat yang paling banyak maka tidak heran NU dengan Banser nya dekat atau setidaknya bagian dari kekuasaan (pemerintah), apalagi jelas-jelas ideologi yang diyakini oleh NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya adalah ideologi Pancasila yang mana kontradiktif dengan ideologi khilafah yang diyakini oleh HTI. NU – termasuk adalah Muhammadiyah – merupakan dua organisasi keagamaan terbesar yang sudah final menerima Pancasila sebagai landasan ideologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua organisasi Islam ini berdiri di belakang pemerintah dalam mengamalkan Pancasila dan menyesuaikan ajaran-ajaran Islam sebagaimana sila-sila dalam Pancasila.

Eksploitasi berita dan wacana mengenai pembakaran bendera tauhid oleh HTI di medsos merupakan strategi HTI untuk memperoleh aspirasi umat Islam dan menggalang massa umat melawan pemerintah yang telah mencabut status hukum organisasinya. Terbangunnya aspirasi umat dan organisasi Islam untuk membela kalimat tauhid dan panji Rasulullah teraktualisasikan dalam wujud demonstrasi berupa aksi bela tauhid di beberapa kota di Indonesia. HTI berhasil memanipulasi wacana dan isu serta menjadi penunggang

dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U). Sebagaimana aksi bela tauhid yang dilakukan oleh GNPF-U baru-baru ini. (<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/01/16580851/wiranto-sebut-aksi-bela-tauhid-buang-energi-dan-tidak-relevan>, diunduh tanggal 3 November 2018).

Dan memang setelah dicabut status badan hukumnya oleh Kemenkumham, dan terutama setelah langkah hukum mereka ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan *judicial review* terhadap Perppu Nomer 2 Tahun 2017 terkait pembubaran ormas, HTI tidak berhenti begitu saja. Salah satu strategi mereka untuk melakukan perlawanan sembari terus mengkampanyekan faham dan ideologinya yakni dengan membuat portal berita daring semacam <http://news.kaffah.net>. Portal-portal berita daring ini menggantikan situs berita resmi mereka [www.hizbut-tahrir.or.id](http://www.hizbut-tahrir.or.id) yang sudah tidak bisa diakses lagi akibat status hukum HTI dicabut oleh pemerintah. Beberapa kolom dalam [kaffah.net](http://news.kaffah.net) bersifat agitatif dan berpotensi untuk memperkeruh kondisi sosial di Indonesia. Masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati bila mengakses portal berita HTI dan sejenisnya yang biasanya mempunyai modus pengenalan, penyebaran faham, hingga proses pembaiatan (indoktrinasi). Disebutkan HTI dalam media-media mereka kerap mengusung slogan-slogan indah

sebagaimana dakwah Islam, khilafah Islamiyah, kembali ke syariat Islam dan menerapkan Islam secara menyeluruh (kaffah) (<https://bidikdata.com/gugatan-ditolak-mahkamah-konstitusi-hti-kini-bergerilya-melalui-media-online.html>, diunduh pada 25 Oktober 2018).

Masifikasi informasi dan pesan sangat bermanfaat untuk organisasi semacam HTI. Dan jelas HTI sangat mumpuni dalam memperlakukan dan menyikapi kelebihan internet sebagai sebuah media baru. Di hampir semua media yang menjadi corong gerakan HTI provokasi dan agitasi sangat lumrah dilakukan. Pengalihan isu ataupun pembohongan publik tidak jarang dilakukan di media-media mereka. Bahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan marwah HTI sendiripun dipraktikkan oleh HTI asal tujuannya tercapai. Meskipun memang ini tidak diakui secara jujur oleh anggota HTI, mereka hanya meyakini bahwa hal-hal seperti itu merupakan bagian dari perjuangan, bukan hal yang substantif atau sepele. Bahkan ada yang secara tegas menyebut bahwa media baru memang identik dengan pembohongan-pembohongan seperti itu.

HTI sendiri sangat sadar dengan keberadaan mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia dan mendominasi setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Umat mayoritas yang notabene merupakan basis gerakan HTI setidaknya menjadi potensi besar bagi HTI dalam meluncurkan strategi politiknya

yang berbalut baju gerakan dakwah. Agar gerakan politiknya sukses setidaknya HTI memerlukan saluran penyebaran ideologis yang bisa diakses dengan mudah oleh umat. Media baru yang berbasis web kemudian dimanfaatkan oleh HTI secara efektif. Diantaranya adalah situs-situs atau portal berita berbasis web. Selain itu adalah melalui media sosial (medsos) dengan berbagai platform medsos yang ada. Termasuk juga berbagai aplikasi percakapan yang sudah sangat lumrah dipakai oleh masyarakat.

Dan tidak dipungkiri bahwa medsos sangat efektif dimanfaatkan untuk tujuan politik. Media sosial salah satu kegunaannya adalah untuk membangun opini dan menggiring wacana publik terkait suatu isu tertentu. Adalah suatu keniscayaan bila medsos menjadi suatu piranti sebuah gerakan sosial baru (*new social movement*). Beberapa peristiwa yang memanfaatkan medsos pernah begitu fenomenal terjadi di Indonesia, semisal gerakan koin untuk Prita, gerakan save KPK, save Kendeng, dan lain sebagainya termasuk bagaimana pembakaran bendera HTI oleh Banser digoreng begitu rupa oleh HTI dan simpatisannya menjadi sebuah isu sangat sensitif yakni pelecehan kalimat tauhid. Setiap isu terkini niscaya sangat cepat beredar di medsos baik berupa tulisan (berita) dan ulasannya, video pendek, ataupun meme. Sebagaimana sebuah medsos maka setiap isu yang ada di dalamnya tidak luput

untuk kemudian didialogkan, diperdebatkan, dikontestasikan, diantara para pengguna internet. Media sosial menjadi ruang-ruang interaktif komunitas baru yang bersifat digital menggantikan ranah konvensional dimana manusia berinteraksi sebelumnya.

Andriadi (2017: 276-279; lihat juga Abugaza, 2013) mengungkapkan kelebihan-kelebihan dari medsos dibandingkan dengan media mainstream. Adapun kelebihan-kelebihan medsos diantaranya adalah, *pertama* efek penguatan. Salah satu strategi dalam komunikasi politik adalah mengidentifikasi pesan utama kampanye. Pesan yang disampaikan melalui berbagai media, cetak, elektronik, dan kegiatan langsung di lapangan, berpotensi untuk hilang tanpa membekas dalam kognisi pemilih. Disinilah peran medsos menjadi penting sebagai *recall memory* dan penguatan pesan yang telah disampaikan. Bila ditelaah ternyata HTI sangat pintar dan jeli dengan efek penguatan dari medsos. Pasca dibubarkan oleh pemerintah maka HTI semakin masif memainkan isu kedzaliman yang diterima olehnya dari pemerintah. Tidak demokratisnya pemerintah karena membubarkan ormas tanpa adanya dialog merupakan bukti otoriternya rezim sekarang ini. Isu dan wacana semacam ini gencar disebarakan melalui medsos. Apalagi kemudian peristiwa pembakaran bendera HTI oleh Banser menjadi

momen yang dipakai oleh HTI untuk semakin mewacanakan pemerintah sebagai pihak yang melindungi pelaku dan ormas yang menghina kalimat tauhid milik umat Islam. Wacana serupa sangat riuh memenuhi medsos dan kontestasi wacana di ranah virtual semakin gaduh antara dua kubu yang saling berseberangan.

*Kedua*, membentuk koneksitas pribadi. Politik memiliki dimensi ruang yang sangat luas, sehingga mustahil disentuh dalam satu waktu bersamaan. Setiap warga memiliki keinginan yang sama untuk bisa berinteraksi, menyampaikan aspirasi, dan berkomunikasi langsung dengan pemimpin atau kandidat pemimpin. Keterbatasan ruang waktu dan jarak yang biasanya menjadi kendala untuk mengafirmasi keinginan yang bersifat massal ini, teratasi dengan kehadiran medsos. Para eks anggota dan simpatisan HTI satu suara dalam melawan pemerintah dalam setiap postingan dan status yang mereka buat di medsos. Dalam ‘pertarungan’ wacana di medsos pun sangat tampak bagaimana sesama simpatisan saling membela dan menyerang lawan politiknya.

*Ketiga* kecanggihan teknologi. Medsos memiliki perangkat yang sangat canggih dalam penyampaian pesan, yang tidak tersedia pada perangkat media lainnya. Ada beberapa aplikasi cara penyampaian pesan yang dapat dipilih. Kecanggihan ini menjadi keunggulan tersendiri, yang

memudahkan proses penyampaian pesan secara efisien dan efektif. *Keempat*, kemampuan merespons. Medsos memiliki kelebihan khusus dalam membangun kemampuan untuk merespon. *Kelima*, pengumpulan informasi. Medsos bukan hanya efektif untuk berkomunikasi, tapi juga dalam pengumpulan informasi. Lebih dari itu, medsos juga dapat menjadi alat untuk mengukur tingkat respon publik terhadap suatu isu atau wacana tertentu di medsos, sehingga sangat berguna untuk proses penyusunan strategi kampanye dan sosialisasi.

Masifnya kecaman pada insiden pembakaran bendera menjadi bukti bagaimana strategi manipulasi informasi yang dilakukan oleh HTI terhadap publik di medsos adalah sebuah keberhasilan. Apalagi kemudian setelahnya ada berbagai aksi massa untuk membela kalimat tauhid yang dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Ini tidak bisa dinafikan begitu rupa oleh pemerintah bahwa perlawanan HTI karena dibubarkan atau dicabut status hukumnya bukan sembarangan. Pengerahan massa dengan mengatasnamakan umat menjadi sangat mudah dilakukan oleh HTI. Setali tiga uang dengan itu maka sesat informasi (hoax) merupakan suatu keniscayaan dalam ruang virtual. Medsos sebagai sarana komunikasi juga sangat rentan dengan hoax. Terkait dengan hoax maka HTI pun sangat

manipulatif dalam setiap postingan dan status yang *dishare* di medsos.

Buletin Media Umat (MU) sebagai salah satu media corong HTI, edisi 21 Juli – 3 Agustus 2017, memakai judul “Perppu No 2 Tahun 2017 Rezim Diktator, Mengancam Islam” dalam merespon Perppu No 2 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membubarkan HTI. Tulisan dalam MU edisi ini sangat khas HTI, sarat dengan provokasi terkait Perppu tersebut. Selain itu dalam mengulas mengenai tiga alasan pencabutan status hukum HTI, MU sendiri sebenarnya tidak memberikan ulasan mengenai bantahan dan kritik terhadap tiga alasan tersebut. Sebaliknya MU menyebut faktor utama dikeluarkannya Perppu No 2 Tahun 2017 yang menjadi landasan pencabutan status hukum HTI adalah karena kekalahan Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota (pilkada DKI) tahun 2017 lalu. Alasan lainnya menurut MU adalah kekalahan calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di hampir 60 prosen daerah. Menurutnya Perppu tersebut dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk balas dendam karena dua alasan utama tersebut di atas. Para taipan/konglomerat yang mendukung Ahok disebut sangat merugi dengan kekalahan Ahok sehingga perlu membalaskan dendam kekalahan atau kerugian tersebut dengan mencari



kambing hitam atau yang dikorbankan. Dan MU menyebut HTI adalah korbannya.

Ismail Yusanto selaku Jubir HTI juga menegaskan ada dua pihak yang berada dibalik Perppu No. 2 tahun 2017. Pertama, mereka yang secara politik dirugikan dengan berkembangnya kesadaran politik umat Islam, sebagaimana tampak pada hasil pilkada 2017 lalu, khususnya pilkada di Jakarta. Calon yang mereka dukung oleh segenap komponen kekuasaan kalah telak. Kedua, mereka yang secara ideologis bertolak belakang dengan kebangkitan Islam sebagaimana ditampakkan pada aksi 212. Bagi mereka aksi itu merupakan ancaman nyata. Bila terus dibiarkan menurut mereka, kesadaran itu semakin membesar dan menggilas ideologi sekuler yang mereka anut. Oleh karena itu komponen-komponen penggerak kebangkitan umat Islam ini harus dihajar habis. Caranya ya melalui Perppu tersebut. Hasil dari pilkada DKI tahun 2017 lalu ternyata tetap dijadikan sebagai tolok ukur dan sebab musabab dikeluarkannya Perppu. Pemerintah dianggap melakukan balas dendam terhadap umat Islam. Sebuah wacana yang bernuansa SARA memang sengaja diciptakan dan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga seolah penguasa atau pemerintah dzalim terhadap umat Islam. HTI mengidentikkan dirinya sebagai representasi umat Islam sedang pemerintah di satu sisi adalah musuh Islam.

HTI berusaha mengalihkan isu tersebut dengan mewacanakan bahwa pencabutan status hukum HTI tersebut terkait dengan upaya balas dendam yang dilakukan oleh pemerintah karena kekalahan Ahok pada pilkada DKI tahun 2017 yang merugikan para taipan/konglomerat pendukung Ahok. Dan isu tersebut disebar di MU yang merupakan media milik mereka sendiri atau yang berafiliasi dengan HTI tanpa membeberkan bukti-bukti atas segala tuduhan balas dendam tersebut. Menytir ulasan dari Bidik Data yang menyebut HTI sering – untuk tidak menyebut selalu – memainkan strategi kepalsuan dan kepura-puraan. Mereka HTI sangat anti dengan UUD 1945 dan Pancasila serta sistem demokrasi, tapi saat dicabut status badan hukumnya malah menggugat menuju peradilan yang berdiri atas dasar UUD 1945. Ditambahkan bahwa ketika HTI mengumumkan banding itu sesungguhnya tidak sesuai dengan doktrin dan ajaran mereka sendiri, yang tidak mengakui sistem banding dalam peradilan. Dalam pasal UUD khilafah yang ditaati HTI jelas-jelas menyebut: “tidak ada pengadilan banding tingkat pertama maupun mahkamah banding tingkat kedua (kasasi) (<https://bidikdata.com/ajukan-kasasi-hti-menjilat-ludah-sendiri.html>, diunduh 30 Oktober 2018). Jika mengacu pada pandangan dari Bidik Data di atas maka semakin jelas bahwa HTI berpretensi dalam aktivitas dan strategi politiknya.

Organisasi HTI ini tidak malu berselingkuh dengan sistem yang dianggap *thogut* demi tercapainya tujuan mereka.

Apa yang kerap dilakukan oleh media-media milik HTI bukan suatu hal yang mengherankan mengingat internet memang dikreasikan agar praktik-praktik seperti itu juga sangat mungkin dilakukan. Terkait dengan itu maka menarik menyimak Wilson (2000) yang mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat tiga karakteristik *digital native* (netizen) yang merupakan bagian dari komunitas virtual di *cyberspace*, yang membedakannya dengan komunitas tatap muka, yakni: (1) *liberty*, kebebasan dari kondisi sosial geografis yang membatasi identitas yang melekat pada diri seseorang; (2) *equality*, penghilangan hierarki yang berhubungan dengan identitas yang melekat, jadi komunitas dapat terbuka terhadap segala hal; (3) *fraternity*, hubungan yang terbentuk antar anggota dalam komunitas tersebut. sementara itu Tambyah (1996) mengidentifikasi tiga karakteristik atau dimensi dari adanya internet: (1) *space/time compression*, dimana internet memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan cepat meskipun berada di tempat yang berbeda; (2) *no sense of place*, interaksi yang terjadi di dunia yang menyediakan konsep anonimitas, yang memungkinkan terjadinya multiplikasi peran dan jati diri, (3) *blurred boundaries and transformed communities*, batasan-batasan yang umumnya

terdapat di dunia nyata menjadi kabur dan komunitas virtual yang baru terbentuk (Sugihartati, 2014: 52-53; lihat juga Rettie, 2002).

Ketika antar netizen yang mempunyai faham dan ideologi yang sama saling berinteraksi di ranah virtual maka akan melahirkan suatu komunitas virtual (*virtual community*). Sebagaimana sifatnya virtual maka sepak terjangnya pun berlangsung di ranah virtual tersebut. Hal yang sama juga terjadi di kalangan para simpatisan dan (eks) anggota HTI. Internet yang menyediakan ruang publik siber dimanfaatkan begitu rupa untuk berdialog, saling silang pendapat, dan menyebarkan ide dan faham-faham yang mereka percaya. Terjadi interaksi dialogis diantara mereka dengan kemungkinan keterlibatan orang-orang yang berbeda faham dengan mereka. Begitu juga sebaliknya ketika mereka berada dalam ruang publik siber yang memang sangat terbuka terkait dengan isu atau wacana apapun untuk diperbincangkan dan diperdebatkan.

Aksi demonstrasi ini menjadi bukti kesuksesan HTI dalam membentuk wacana manipulatif dari isu pembakaran bendera HTI ke isu pelecehan bendera tauhid dan panji Rasulullah. Apalagi wacana tersebut dikuatkan dengan wacana sebelumnya bahwa pembubaran HTI dikarenakan kekalahan Ahok di pilkada DKI, serta kekalahan sebagian besar PDIP di

pilkada serentak tahun 2018. Sebaliknya kekalahan Ahok tersebut diwacanakan sebagai kemenangan umat, sebagai momen kebangkitan sistem khilafah yang akan selanjutnya akan diberlakukan di seluruh Indonesia. Pemerintah atau rezim sekarang dianggap sebagai rezim yang sangat dzalim membubarkan HTI tanpa adanya dasar hukum yang kuat sama sekali.

Melalui media, wajah agama berikut ide dan gagasan-gagasannya yang sangat beragam itu ditampilkan dan direproduksi. Wajah agama di ruang publik media itu juga menyiratkan kontestasi dan perebutan pengaruh pengaruh masing-masing wajah agama itu di ruang publik. Di bidang politik ruang publik itu ditandai dengan kelahiran partai-partai politik Islam baru yang aktif menyuarakan seruan-seruann ideologi Islamisme seperti penegakan syariat Islam (Dja'far, 2018: 242-243). Dan memang di internet ataupun medsos yang terjadi kemudian adalah kontestasi ide ataupun nilai yang notabene merupakan penggambaran realitas sosial politik dalam kehidupan bermasyarakat.

### **C. Infiltrasi dalam Organisasi Sosial Politik dan Kegiatan Dakwah**

Langkah hukum HTI untuk menggugat pemerintah pasca dibubarkan tampaknya akan menempuh jalan terjal. Banding yang diajukan oleh HTI di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pun tetap ditolak, bahkan putusan PTUN menyatakan bahwa SK Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai prosedur. Putusan tersebut berdasarkan bukti bahwa HTI ternyata mengembangkan ajaran atau faham khilafah yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. HTI juga diyakini mengimplementasikan ajaran-ajaran khilafah tersebut dalam bentuk kegiatan-kegiatan dengan menyebarkan ajaran khilafah yang tujuan akhirnya mengganti Pancasila dan UUD 1945 serta mengubah NKRI menjadi negara khilafah Islamiyah (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180926201737-12-333491/banding-ditolak-hti-ajukan-kasasi-ke-mahkamah-agung>, diunduh tanggal 27 September 2018).

Kalah dalam pengadilan banding di PTUN, HTI kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pendaftaran kasasi HTI ke MA sudah dilakukan pada 19 Oktober lalu oleh kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra. Dalam laporan [kompas.com](http://kompas.com) Yusril sendiri mengimbau semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang

berlangsung. Ditambahkan olehnya bahwa gugatan hukum HTI melawan Menkumham masih berlanjut dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/29/15344451/hti-ajukan-kasasi-terkait-pencabutan-status-badan-hukum-oleh-pemerintah>, diunduh 1 November 2018). Laik kita tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus pembubaran HTI, apakah akan dikalahkan lagi dengan ditolaknya gugatan atau kasasi HTI oleh MA atau malah sebaliknya akan memenangkan HTI.

Aksi massa yang dilakukan oleh beberapa ormas pasca pembubaran bendera HTI harus diakui merupakan kesuksesan HTI dalam memanipulasi wacana dari suatu insiden. Akidah dieksploitasi begitu rupa untuk menumbuhkan sentimen keagamaan di kalangan umat muslim Indonesia. Dari kasus tersebut pemerintah sendiri jelas-jelas menjadi pihak yang difitnah oleh HTI berlaku dzalim terhadap umat Islam karena membela oknum yang membakar bendera tauhid milik umat Islam. Pemerintah dianggap disetir oleh kelompok ormas mayoritas sehingga tidak memberikan hukum maksimal kepada pelaku.

Terkait dengan demonstrasi yang mengusung nama “bela tauhid” tidak heran ditunggangi oleh HTI. Secara khusus Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengungkapkan bahwa aksi

demonstrasi bela tauhid pasca insiden pembakaran bendera HTI disusupi oleh eks anggota dan simpatisan HTI. Terdapat kelompok-kelompok yang memanfaatkan demonstrasi tersebut untuk kepentingan politik, pun dimanfaatkan untuk teman-teman HTI agar tetap eksis (<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/09/17180491/wiranto-demo-soal-pembakaran-bendera-ditunggangi-eks-anggota-hti>, diunduh tanggal 9 November 2018). Akan selalu ada upaya dari HTI untuk memanfaatkan kesempatan meskipun sudah dibubarkan oleh pemerintah. Aksi dan insiden yang melibatkan umat Islam sebagaimana demonstrasi bela tauhid menjadi momen yang bisa disusupi oleh HTI dan para eks anggotanya.

Harus diakui bahwa HTI menerapkan strategi infiltrasi atau penyusupan ke dalam berbagai ormas ataupun parpol serta kegiatan-kegiatan dakwah (pengajian). Mengacu pada status hukumnya yang sudah dicabut, maka seharusnya HTI tidak boleh melakukan berbagai aksi atau kegiatan yang mencirikan sebuah ormas hingga adanya sebuah putusan yang tetap (*inkracht*). Namun dalam praktiknya praktik-praktik provokasi dan infiltrasi pasca pembubaran HTI cukup masif terjadi.

Menurut Arif (2018: 130-131) terdapat dua strategi besar untuk menegakkan syariat Islam. *Pertama*, strategi ideal. Strategi ini mencakup pendirian khilafah Islamiyah sebagai prasyarat struktural bagi penegakan syariat. Hal ini didasarkan



pada ajaran Al-Quran, sunnah, dan praktik politik Nabi sebagai penerap syariat tersebut. Artinya, untuk menerapkan syariat, maka harus ada khalifah sebagai legislator penerapan syariat. Dan terdapat dua tahap dalam penerapan syariat. Tahap pertama, sebagai konstitusi (*dustur*). Konstitusi syariat memuat pokok-pokok terpenting dari syariat yang bisa menggambarkan syariat Islam secara utuh, meskipun dengan redaksi global dan ringkas. Disinilah pokok-pokok penerapan syariat dalam berbagai hal dirumuskan. Tahap kedua, sebagai Undang-undang (*qanun*). Maksudnya ialah perundang-undangan syariat di setiap lini kehidupan. Dalam kaitan ini, HTI kemudian merumuskan perspektif syariat dalam pengelolaan semua sektor kenegaraan, mulai dari sumber daya alam, pendidikan Islam, tenaga kerja, kemiskinan, good government, kriminalitas, pembangunan ekonomi, politik luar negeri, hingga penanganan korupsi. Hal ini merupakan kampanye komprehensif atas kemampuan syariat dalam menyelesaikan persoalan, maka soal-soal tersebut adalah soal-soal yang akan diperundang-undangkan via syariat Islam.

Strategi *kedua* bersifat pergerakan. Inilah strategi pergerakan HTI untuk menegakkan kembali khilafah Islamiyah sebagai *conditio sine qua non* bagi terapnya syariat Islam. pada titik ini, strategi gerakan HTI dinisbatkan pada strategi perjuangan Nabi SAW, yang memuat tiga tahap. Pertama,

tahap pembinaan dan pengkaderan (*marhalah tatsqif*). Dalam tahap awal ini, Nabi melakukan dakwah dan pembentukan kader ideologis secara sembunyi-sembunyi. Tahap inilah tahap awal di Mekkah, dan dilakukan secara terbatas, sejak keluarga, sahabat, hingga para budak. Target tahap ini adalah pembentukan kader militan dan penanaman ideologi kepada kader. Kedua, tahap interaksi dan pengkaderan (*marhalah tafa'ul wal kifah*) yakni tahap dakwah secara terbuka kepada masyarakat luas. Dalam tahap ini Nabi telah mempraktikkan strategi pergulatan pemikiran (*shiraul fikr*) dan perlawanan politik (*kifah siyasi*). Pergulatan pemikiran diartikan sebagai perang terhadap ide-ide jahiliyah yang musyrik dari kaum kafir. Sementara perlawanan politik diartikan sebagai perlawanan atas kedholiman yang dilakukan oleh kaum kafir Mekkah terhadap umat Islam yang akhirnya mengantarkan Nabi hijrah ke Madinah. Setelah tahap kedua inilah maka perjuangan Nabi mencapai tahap ketiga, yakni penerimaan kekuasaan (*marhalah istilamul hukm*), yakni tahap pendirian negara Madinah setelah Nabi mendapat baiat dari suku-suku besar di Madinah. Pada tahap ini Nabi menurut HTI akhirnya menjadi kepala negara, yang dengannya mampu menyebarkan Islam melalui kekuatan dakwah dan militer.

Strategi pergerakan HTI mengacu pada strategi pergerakan yang ditetapkan oleh HT internasional yang

terinspirasi dari perjuangan Nabi. Secara umum strategi itu mencakup tiga tahapan (*marhalah*) perjuangan. Tahap *pertama*, yakni tahap pembinaan dan pengkaderan (*marhalah tatsqif*). Pada tahap ini yang dilakukan adalah membentuk kader-kader partai. Tahap *kedua*, yakni tahap interaksi dengan masyarakat (*marhalah tafa'ul ma'a al-ummah*). Pada tahap ini para kader partai diturunkan di tengah masyarakat untuk mengenalkan gagasan HTI. Dalam tahapan ini, para aktivis HTI mengenalkan jawaban keIslaman atas segala persoalan kemasyarakatan sehingga umat Islam yakin dengan kebenaran Islam. Dan tahap *ketiga*, yakni tahap pengambilalihan kekuasaan (*marhalah istilam al hukm*). Setelah umat sadar akan kebenaran tunggal Islam, maka secara otomatis umat akan menuntut diterapkannya hukum Islam, sekaligus pendirian negara Islam (Arif, 2018: 131-132).

Strategi perjuangan yang diinspirasi oleh perjuangan nabi tampaknya tidak dilaksanakan sebagai dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dulu. HTI bahkan terkesan melakukan berbagai cara, bahkan dengan cara-cara yang manipulatif pun dipraktikkan demi tercapainya tujuan HTI. Manipulasi-manipulasi yang dijalankan oleh HTI terutama di berbagai media daring dan medsos sbagaimana diuraikan sebelumnya menjadi bukti sahih bahwa HTI seperti bunglon dalam gerakan dakwah berbaju politiknya.

Infiltrasi HTI terlihat semakin jelas ketika anggotanya merambah ke sekolah-sekolah Islam dan Perguruan Tinggi Islam. Di UMY, beberapa dosen di Fakultas Fisipol, Teknik, Ekonomi, dan Hukum adalah aktivis HTI. Mereka menyusun program yang disebut Islamisasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan menyusun kurikulum Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang hanya boleh diajarkan oleh orang-orang tertentu, khususnya alumni Timur Tengah. Tak hanya cukup melalui Perguruan Tinggi, HTI juga menyusup ke dalam ormas besar seperti NU. Ketua Umum PBNU pada waktu itu, KH. Hasyim Muzadi, mengakui bahwa masjid-masjid yang selama ini dibangun dan dikelola oleh warga NU beserta takmir dan ritual peribadatannya telah diambilalih oleh HTI (Lubis & Jamuin, 2015; lihat juga Wahid, 2009).

Kegiatan infiltrasi atau penyusupan ke dalam tubuh ormas dan berbagai kegiatan dakwah atau pengajian dilakukan oleh kader-kader HTI yang memang sengaja disebar begitu rupa untuk berdakwah sebagaimana pengakuan mereka, yang mana dakwah yang mereka lakukan dengan cara meyakinkan umat bahwa sistem demokrasi yang dianut oleh negara adalah haram dan sangat laik untuk dimusuhi. Penyusupan semacam itu semakin dikuatkan dengan instrumen media daring yang bisa mengkoneksikan siapapun dan kapanpun.

Disinyalir juga bahwa di berbagai kegiatan dakwah HTI sering menyusup. Para eks anggota dan simpatisan HTI ketika ada pengajian meskipun bukan pengajian oleh kelompoknya sering memasukkan dan menaruh atribut-atribut HTI yang identik dengan Islam sebagaimana halnya bendera HTI yang memang bertuliskan kalimat tauhid. Setelah pembubaran HTI tidak sedikit kemudian kegiatan-kegiatan dakwah ditolak karena dianggap disusupi oleh HTI. Sebagaimana pengajian yang seyogyanya akan dihadiri oleh Ustad Abdul Somad (UAS) di Jepara. Pengajian UAS pun dianggap disusupi oleh HTI. Tim dari pengajian UAS tersebut dianggap sudah menyebarkan simbol-simbol HTI di beberapa titik di Jepara jauh-jauh hari sehingga ditolak oleh warga Mayong, Kecamatan yang seyogyanya menjadi tempat pengajian UAS. Menurut Munif, yang menjadi koordinator Aliansi Masyarakat Kecamatan Mayong, masyarakat diharapkan untuk selalu mewaspadaikan segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur radikalisme dengan melakukan kroscek dan monitoring. Karena HTI saat ini terus berusaha untuk merasuk melalui berbagai sayap atau organisasi dan tokoh Islam secara *soft approach* (pendekatan lembut). Demi alasan keamanan dan kenyamanan, masyarakat harus menolak keras segala kegiatan atau hal-hal yang berhubungan dengan HTI karena telah dicabut status hukumnya (<https://bidikdata.com/pengajian-uas-di-jepara->

diduga-disusupi-hti.html, diunduh tanggal 1 November 2018). Dari hasil wawancara dengan Kustam, seorang tokoh muda pemuda Mayong, mereka memang percaya bahwa kegiatan pengajian yang akan mendatangkan UAS tersebut disusupi oleh HTI.

“Atribut-atribut HTI sudah banyak disiapkan oleh orang-orang yang bukan warga Mayong, dan dikirim dengan memakai truck. Sebagian sudah banyak dipasang di beberapa tempat strategis di Mayong. Mungkin juga sudah ada di Jeparan Kota. Kami tahu HTI sudah terlarang makanya kami tolak” (wawancara dengan Kustam, 6 September 2018).

Selainnya sebagai sebuah ormas yang sudah dibubarkan HTI seyogyanya tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu konflik hingga pengadilan dalam hal ini MA mempunyai putusan tetap terhadap HTI. Kasus rencana pengajian UAS yang dibatalkan oleh warga Mayong sebenarnya bermula dari HTI atau eks anggota HTI dan simpatisannya yang melakukan penyusupan atau membonceng acara pengajian padahal statusnya sebagai ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah.

Aksi pembakaran bendera HTI – yang diklaim oleh HTI sebagai bendera tauhid – pun sebenarnya bermula karena adanya penyusup yang membawa atribut bendera HTI di acara

peringatan HSN di Garut. Sebagaimana diungkap oleh Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini, bahwa ada upaya secara sistematis untuk melakukan infiltrasi dan provokasi terhadap pelaksanaan acara peringatan HSN. Bahkan ditemukan ada satu truk bendera berlafadz tauhid sudah dikirim ketika acara HSN. Sebagaimana sudah dikibarkan di beberapa wilayah di Jawa Barat. Banser sendiri menurutnya merupakan korban dari praktik infiltrasi dan provokasi sehingga tidak heran kemudian melakukan pembakaran terhadap bendera HTI tersebut (<http://mediaindonesia.com/read/detail/193243-sekjen-pbnu-satu-truk-bendera-hti-dimobilisasi-untuk-infiltrasi-hsn>, diunduh tanggal 30 Oktober 2018).

Infiltrasi HTI ke dalam parpol juga terjadi. Partai Bulan Bintang (PBB) yang berada dibawah komando Yusril Ihza Mahendra yang notabene merupakan pengacara dan pembela HTI. Jubir HTI Ismail Yusanto juga mengakui bahwa sudah ada pembicaraan antara kader HTI dengan PBB terkait keikutsertaan di pemilu legislatif (pileg) tahun 2019 nanti. Ditambahkan juga olehnya bahwa HTI akan sepenuhnya mendukung PBB karena dinilai sebagai partai Islam yang selama ini Ketua Umum nya secara terang-terangan memberikan pembelaan dan dukungan terhadap HTI (<http://inibenar.com/diloloskan-bawaslu-pbb-galang-kekuatan->

dengan-hti-di-pemilu-2019/, diunduh tanggal 10 Oktober 2018).

Dalam tradisi struktural Marxisme, kita bisa menganalogikan HTI sebagai representasi kelas proletariat yang berada pada struktur bawah (*base structure*) yang selalu mengalami subordinasi dari pemerintah yang dianalogikan sebagai borjuis kapitalis. Konstelasi politik yang kemudian membunch dari relasi antara pemerintah bersama organisasi dan pihak-pihak pendukungnya dengan HTI merupakan sebuah relasi struktural kekuasaan. Bahwa segala sumber daya yang dimiliki oleh para borjuis kapitalis (pemerintah) dimanfaatkan untuk melakukan praktik-praktik deskriminatif terhadap kelompok proletariat yang diwakili oleh organisasi HTI.

Upaya perlawanan dari HTI adalah gambaran perjuangan kelas meskipun dengan cara-cara yang manipulatif memanfaatkan setiap sumberdaya yang mereka miliki. Konflik adalah suatu keniscayaan dari setiap perjuangan. Begitu juga dengan eks HTI yang melawan kuasa negara dan relasi-relasinya. Negara Islam dengan sistem khilafah adalah cita-cita HTI. Ini sama persis dengan utopia kaum Marxist yang mencita-citakan masyarakat tanpa kelas atau komunisme.

Bahwa dalam perjuangan kelas, mereka mengalami kuatnya legitimasi oleh negara terhadap mereka. Negara berusaha melakukan dominasi dan hegemoni terhadap mereka



melalui pemaksaan ideologis bahwa ideologi Pancasila adalah merupakan ideologi final yang tidak bisa ditawar-tawar lagi apalagi dengan ideologi khilafah. Selain itu juga bentuk kuasa negara terhadap mereka lewat tindakan-tindakan represif kepada anggota-anggota eks HTI ataupun simpatisannya terutama semakin masif pasca dibubarkan. Adanya beragam perlakuan represif yang mereka terima menjadikan HTI memaksimalkan sel-sel HTI yang sudah dibentuk dan dikader melalui kegiatan dakwah. Yang sangat memungkinkan adalah sel-sel HTI yang sudah terbentuk kuat di kalangan intelektual muda kampus. Gerakan-gerakan yang mengusung ideologi Marxisme juga sama memaksimalkan tenaga-tenaga muda progresif dan revolusioner secara laten yang sewaktu-waktu ketika dirasa sudah saatnya akan merebut kekuasaan.

Perjuangan HTI adalah perjuangan identitas keIslaman mereka yang berbeda dengan Islam mayoritas di Indonesia. Secara tidak langsung HTI dalam perjuangan politiknya sebenarnya memainkan politik identitas. Dalam mendefinisikan politik identitas, Agnes Heller mengungkapkan bahwa politik identitas sebagai politik yang memfokuskan pada pembedaan sebagai kategori utamanya yang menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (*free play*), walaupun memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Politik identitas dapat mencakup rasisme,

biofeminisme, environmentalisme, dan perselisihan etnis. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukkan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya peraturan daerah tentang syariah maupun upaya untuk menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu (Sosiawan & Rudi, 2015). Dalam perjuangan politiknya HTI menyuarakan khilafah yang dianggap “haram” untuk diterapkan secara kaffah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dalam setiap dakwah mereka selalu mempromosikan khilafah sebagai satu-satunya ideologi yang bisa dipakai untuk memecahkan permasalahan keumatan di Indonesia, bukan sistem demokrasi yang jelas tidak Islami (*thogut*). Penerapan syariah Islam juga bagian dari cita-cita HTI yang menurutnya akan tercapai jika ideologi negara adalah khilafah.

## **Bab IV**

### **Respon Pemerintah Terhadap Eks HTI dan Gerakannya**

Setelah mencabut status badan hukum HTI melalui Kemenkumham dan dikuatkan dengan Perppu Nomer 2 Tahun 2017, maka pemerintah seyogyanya tidak lantas berdiam diri dengan eks pengurus dan anggota dan simpatisan HTI sembari menjalani tuntutan yang sedang diajukan oleh HTI pada tingkat kasasi. Ekses dari dicabutnya status hukum HTI tersebut sudah mulai terasa adanya friksi di masyarakat antara mereka yang para eks anggota dan simpatisan HTI dengan masyarakat umum yang mencela sistem khilafah yang diusung oleh HTI.

Para eks anggota HTI juga harus dipikirkan bagaimana mereka selanjutnya setelah HTI dibubarkan oleh pemerintah. Hal yang harus dihindari selain terjadinya konflik horizontal di masyarakat antara yang pro dan kontra terhadap HTI, pun bagaimana masyarakat pada umumnya dalam menyikapi para eks anggota dan simpatisan HTI. Persekusi dan perundungan terhadap eks anggota HTI jangan sampai dilakukan oleh mereka yang melawan sistem khilafah.

Pemerintah sendiri sangat tanggap dan aktif dalam mengupayakan kondisi yang kondusif di masyarakat setelah pembubaran HTI mengingat tahun ini juga merupakan tahun

politik yang sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memancing di air keruh. Apalagi terjadi insiden pembakaran bendera HTI yang berbuntut adanya aksi massa bela tauhid yang ditunggangi oleh HTI dan beberapa kelompok yang mempunyai kepentingan di Pilpres tahun depan. Pemerintah sendiri, dalam hal ini Kemenkopolkham, sudah melakukan koordinasi dan dialog dengan para petinggi ormas Islam terkait insiden pembakaran bendera HTI. Dan dari pertemuan dialog tersebut sudah terjadi kesalingpahaman serta kesepakatan bahwa peristiwa tersebut dianggap sebagai kesalahpahaman yang tidak lagi boleh terjadi di masa yang akan datang. Bahkan disampaikan oleh Wiranto bahwa kesepakatan tersebut menyangkut bagaimana umat Islam, harus ikut bersama-sama dengan aparat menjaga stabilitas keamanan, politik, taat hukum, yang merupakan kewajiban semua agar negara kita Indonesia selalu damai, rukun, stabil (<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/09/13581341/ini-kesepakatan-menko-polhukam-dan-sejumlah-ormas-islam-soal-pembakaran>, diunduh tanggal 9 November 2018).

Meskipun demikian kewaspadaan seyogyanya terus ditingkatkan meskipun HTI sudah dibubarkan. Pemerintah jangan sampai kecolongan lagi dengan peristiwa-peristiwa serupa penyusupan ke acara-acara pengerahan massa yang bisa menimbulkan terjadinya gesekan lagi di tengah masyarakat.

Ramdhani (<http://www.nu.or.id/post/read/90289/menetapkan-kewaspadaan-pasca-pembubaran-hti>, diunduh tanggal 15 Oktober 2018) mengungkapkan bahwa terdapat faktor eksternal dan internal yang sangat berpotensi mendorong keberadaan HTI di Indonesia. *Faktor internal* terkait dengan kebangkitan populisme di Indonesia yang turut ditandai dengan adanya kebangkitan radikalisme Islam, yang mendorong sentimen anti-China dan nasionalisme ekonomi. Gerakan ini dipimpin oleh kelompok Islam radikal yang semakin tumbuh kuat di Indonesia. Walaupun mereka telah gagal untuk mendominasi politik utama, namun para populis Islam berada di posisi yang bagus dalam mengambil keuntungan sosial, politik dan ekonomi, untuk meningkatkan pergerakan mereka, terutama mengingat ketimpangan etnisitas masih sangat tinggi, dan Muslim Indonesia masih merasa terpinggirkan di negara dimana mereka adalah kelompok mayoritas. Sedang *faktor eksternal* menyangkut perebutan kekuasaan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah yang membuat banyak negara “ngiler” untuk menguasainya. Banyak contoh peristiwa yang bisa dijadikan pelajaran bagaimana negara-negara Islam telah hancur akibat intervensi asing dengan memanfaatkan organisasi internal di negara-negara Islam Timur Tengah untuk merongrong kekuasaan negara-

negara tersebut untuk kemudian menguasai sumber daya alam di dalamnya sementara menyalakan konflik yang terus menerus tanpa henti dalam internal negara tersebut.

Tahun politik sangat memungkinkan munculnya dan semakin maraknya gerakan-gerakan populisme berbaju agama di Indonesia. Berbagai demonstrasi yang mengatasnamakan agama Islam menjadi pintu masuknya HTI untuk melakukan penyusupan atau setidaknya menunjukkan eksistensinya dengan pengibaran ataupun pemasangan atribut-atribut HTI lainnya.

Gerakan-gerakan fundamentalisme Islam di Indonesia diyakini sudah mengalami transformasi yang cukup signifikan dalam berbagai modus dan strategi perjuangannya meskipun ideologi fundamentalisme untuk mendirikan negara Islam dengan sistem khilafah dan formalisasi syariat Islam tetap menjadi cita-cita utama mereka. Transformasi fundamentalisme dalam berbagai strategi dan modus gerakan ini diistilahkan oleh Hiariej (2018) sebagai gerakan pascafundamentalisme.

Adapun gerakan-gerakan pascafundamentalisme di Indonesia dikategorisasikan ke dalam tiga kelompok berbeda (Hiariej, dkk. , 2018), yakni: antitesis, protesis, dan sintesis. Kelompok *antitesis* direpresentasikan oleh HTI dan JI (Jamaah Islamiyah). Keduanya ini sekarang sudah dilarang.

Sebagaimana kita ketahui HTI sendiri dicabut status badan hukumnya sejak tahun 2017 lalu. Kelompok antitesis mempunyai karakteristik utama yakni agenda Islam transnasional, yang berusaha membangun komunitas politik lebih besar dalam bentuk khilafah. Kedua kelompok dalam kategori antitesis ini berbeda sama sekali. Kelompok JI sangat terkenal dengan cara-cara kekerasan dan serangan-serangan teroris dalam mewujudkan tujuannya. Sedang HTI sendiri sangat mengecam cara-cara kekerasan, sebaliknya lebih mengedepankan jalan dakwah, propaganda dan pendidikan sebagai cara terbaik untuk mewujudkan tujuan-tujuannya.

Kelompok *protesis* diwakili oleh partai-partai politik Islam seperti PKS, PPP, PBB. Karakter utama kelompok protesisi ini adalah pengakuan pada negara bangsa sebagai tingkat tertinggi bagi formasi sosial. Terdapat perbedaan pandangan juga dalam kelompok protesisi ini. Satu kelompok berpandangan bahwa demokrasi merupakan sebuah instrumen untuk menerapkan syariah. Sedang kelompok yang lain percaya bahwa sebagian besar prinsip-prinsip demokrasi sudah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan prioritasnya mesti diberikan pada bagaimana mewarnai rezim politik yang ada dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Kelompok *sinstesis* terdiri dari kelompok-kelompok seperti FPI, Forum Umat Islam (FUI), dan Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS). Faktor

utama yang menyatukan kelompok-kelompok ini adalah aksi vigilanturnya dalam mengatur ruang-ruang publik menurut nilai-nilai Islam. Dengan demikian Islam direifikasi sebagai sebuah sumber perilaku moral. Selain itu kelompok-kelompok ini sudah menunjukkan beberapa tanda perubahan dalam dua tahun terakhir dengan keterlibatan mereka di politik formal baik di tingkat nasional dan lokal.

### **A. Merangkul HTI**

Pembubaran HTI masih menyisakan polemik di masyarakat. Meskipun proses banding mereka (kasasi) sudah diajukan ke MA, namun berbagai peristiwa pasca pembubaran HTI cukup membuat resah di masyarakat. Bahkan tidak sedikit terjadi bentrokan antara eks HTI dan simpatisannya yang mengusung ideologi khilafah dengan organ atau kelompok masyarakat yang sangat anti dengan ideologi khilafah. Ini menjadi pekerjaan rumah lanjutan yang tidak mudah buat pemerintah.

Tidak sedikit imbauan kepada masyarakat untuk kembali menerima eks HTI. Bahkan menteri Agama sendiri di suatu kesempatan pernah menyuarakan untuk menerima eks HTI kembali di masyarakat. Namun hal tersebut tidaklah mudah, khususnya bagi mereka para eks HTI yang sudah kadung diberi label jelek atau stereotipe di masyarakat.



Menurut Hiariej, dkk (2018: 322-325) bahwa kelompok-kelompok pascafundamentalis, HTI termasuk di dalamnya, permasalahan yang dihadapi oleh mereka adalah persoalan ekslusi. Persoalan ekslusi ini menyangkut bagaimana mereka diperlakukan oleh masyarakat secara diskriminatif dan kuatnya stigmatisasi terhadap mereka. Sebagian besar kelompok pascafundamentalis masih kesulitan mendapatkan pekerjaan atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik. Mereka selalu dicurigai, baik cara hidupnya, penampilan fisiknya, dan gaya khasnya dalam menjalankan ritual-ritual Islam. ketidakpercayaan, dan prasangka jelas sangat berkontribusi pada proses ekslusi kelompok pascafundamentalis. Kecenderungan memperlakukan kelompok pascafundamentalis sebagai warga yang tidak normal oleh masyarakat umum berkembang menjadi praktik ekslusi yang beroperasi terutama melalui penindasan simbolik dan marginalisasi dari arena-arena publik. penindasan simbolik dan marginalisasi saling membentuk satu sama lain dalam proses stigmatisasi terhadap kelompok-kelompok pascafundamentalis. Penindasan simbolik beroperasi melalui berbagai istilah seperti ‘fundamentalis’, ‘radikal’, dan atau ‘teroris’, yang semuanya menempatkan kelompok-kelompok ini sebagai warga negara yang tidak baik, muslim yang buruk, dan atau anti demokrasi. Proses pelabelan ini terus menerus direproduksi oleh aparat-aparat kekuasaan

dengan menampilkan kelompok pascafundamentalis ini sebagai entitas kolektif yang tidak sesuai dengan dunia modern.

“kapasitas saya sebagai seorang ahli yang dimintai tolong oleh HTI berimbas pada munculnya wacana saya adalah anggota HTI. Saya bukan anggota HTI. Kalau saya anggota HTI saya pasti punya kartu anggota HTI. Berawal dari menjadi ahli pada persidangan HTI saya kemudian dicopot dari beberapa jabatan akademik saya di Fakultas Hukum Undip” (wawancara dengan Suteki, 14 Agustus 2018).

Kasus yang menimpa Prof. Suteki nampaknya menjadi sebuah analogi yang bagus bagaimana perlakuan yang diterima oleh eks HTI ataupun simpatisannya dan orang-orang yang dianggap menjadi bagian dari HTI. Dalam pengakuan beliau, beberapa jabatan akademiknya dicopot di FH Undip, sekarang dia hanya berkewajiban untuk mengajar saja. Diskriminasi diterima dan dialami oleh Suteki dan orang-orang yang dianggap menjadi bagian dari HTI di masyarakat. Seorang guru besar saja mengalami hal serupa apalagi eks HTI dan simpatisannya yang bukan intelektual (<https://tirto.id/gelombang-stigmatisasi-039radikalisme039-di-perguruan-tinggi-negeri-cPq7>, diunduh tanggal 1 September 2018). Tidak hanya Suteki, terdapat juga beberapa dosen dari berbagai Universitas yang dianggap merupakan eks HTI dan

simpatisannya. Nasib mereka yang diduga HTI tidak berbeda jauh dengan yang dialami oleh Suteki, mereka mendapat sanksi diberhentikan dari jabatan struktural di kampus.

Terkait dengan informasi banyaknya anggota HTI dan simpatisannya di kalangan dosen di berbagai Universitas dan Perguruan Tinggi setidaknya dibenarkan oleh BNPT yang menyebut bahwa terdapat 7 kampus negeri ternama yang sudah terpapar paham radikalisme. Apa yang diungkapkan oleh BNPT semakin memperkeruh kondisi namun setidaknya ini secara terang-terangan sudah mengungkapkan parahnya fundamentalisme yang sudah menggerogoti dunia akademik di Indonesia.

## **Meme 4.1 7 Kampus Negeri Ternama Terpapar Radikalisme**



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Teroris

Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M Nasir, menyebut apa yang diungkap oleh BNPT tersebut hanya persepsi dari hasil penelitian. Hal tersebut perlu dikaji lebih jauh lagi. Sebagai tindakan selanjutnya menyikapi informasi dari BNPT tersebut Menristekdikti memanggil seluruh Rektor Perguruan Tinggi

Negeri, dan meminta para Rektor untuk seluruh mahasiswa, staf, serta dosen yang terpapar paham radikalisme (<https://news.detik.com/berita/4057461/menristek-jelaskan-kabar-7-kampus-negeri-ternama-terpapar-radikalisme>, diunduh 10 Oktober 2018). Termasuk bagaimana kemudian wacana dari Kemenristekdikti yang hendak mengawasi medsos mahasiswa dan dosen. Langkah yang reaktif dari Kemenristekdikti karena adanya tuntutan untuk memberantas radikalisme agama di kampus.

Namun wacana Kemenristekdikti untuk mengawasi medsos mahasiswa dan dosen tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak. Situs [tirto.id](https://tirto.id) menurunkan ulasan yang menyebut bahwa jika direalisasikan rencana tersebut maka dianggap salah kaprah dan melampaui kewenangan Kemenristekdikti. Kewenangan Kemenristekdikti hanya sebatas mengembangkan pengetahuan anti radikalisme. Dan aktivitas mengintai akun medsos civitas akademika berpotensi mengebiri kebebasan berpikir dan berpendapat (<https://tirto.id/kontroversi-kemenristek-dikti-awasi-medsos-dosen-dan-mahasiswa-cMiq>, diunduh tanggal 5 Oktober 2018).

Perundungan di ranah virtual juga harus menjadi perhatian khusus. Tidak sedikit praktik persekusi gencar diarahkan kepada orang-orang yang dianggap eks HTI dan simpatisan HTI. Peran media khususnya media daring sangat

besar dalam mengurangi praktik eksklusi bagi kalangan eks HTI. Liputan mengenai HTI sering tidak berimbang di media-media mainstream. Dengan demikian sudah terbentuk citra mengenai HTI yang merupakan ormas yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah. Citra mengenai HTI ini kemudian tidak heran turut dialami oleh eks HTI dan simpatisannya di media.

Penciptaan batas-batas eksklusioner yang sistematis pada akhirnya menjadikan mereka semakin terpinggirkan dalam arena-arena publik, dan peminggiran ini pada gilirannya memenuhi stereotipe bahwa kelompok pascafundamentalis lebih memilih sebagai kelompok yang berada di luar (*outsider*). Sementara penindasan simbolik dan marjinalisasi menjadi inti dari eksklusi politik, ekonomi, dan budaya (Hiariej, dkk., 2018: 325). Semakin maraknya praktik eklusi terhadap eks HTI maka akan semakin menjauhkan mereka dari akses-akses sosial, ekonomi, politik, dan budaya, yang seharusnya tidak ada pembedaan yang mereka terima dengan warga atau masyarakat lainnya. Seharusnya pemerintah semakin gencar dalam proses inklusi eks HTI dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan di berbagai bidang tanpa membedakan mereka dengan warga yang lain.

Mereka para eks HTI tidak serta merta langsung bisa meninggalkan faham yang mengindoktrinasi mereka selama

ini. Hal ini harus dipahami paling mendasar oleh pemerintah dan masyarakat sehingga dalam upaya menginklusi para eks HTI tersebut tidak dengan memaksa mereka begitu saja melakukan apa yang lumrah dipraktikkan oleh warga pada umumnya. Selain itu dalam proses penginklusan mereka tersebut bukan tidak mungkin para eks HTI masih membawa identitas dan atribut lama HTI baik dalam pemikiran ataupun dalam perilaku sehari-hari. Identitas fisik yang biasanya mereka tonjolkan sebagai eks anggota dan simpatisan bukan tidak mungkin dalam proses inklusi masih tetap dipakai atau diperlihatkan di muka umum, sehingga pemerintah seyogyanya menyadari hal tersebut dan tetap mengkampanyekan agar tidak terjadi tindakan persekusi dan diskriminasi kepada mereka.

Eks anggota HTI dapat bergabung dalam sebuah parpol. Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, berpendapat bahwa semua warga negara mempunyai hak untuk barpartai. Pun setiap parpol bebas menentukan siapa saja orang yang hendak mereka tampung atau tidak sebagai anggota (<https://tirto.id/kpu-persilakan-parpol-rekrut-eks-anggota-hti-cGhZ>, diunduh 30 September 2018). Dengan bergabungnya para eks pengurus ataupun anggota HTI ke dalam sebuah parpol ataupun mendaftar menjadi salah satu calon legislatif (caleg) dalam pileg yang akan datang mengindikasikan bahwa HTI atau setidaknya eks HTI menerima sistem demokrasi.

Sebelumnya para pengurus dan anggota serta simpatisan HTI menolak sistem demokrasi dan perwakilan parlementer.

“...kalau beberapa individu HTI sangat dimungkinkan untuk bergabung dalam parpol, yang artinya keluar dari organisasi HTI. Tapi secara umum menurut saya sangat kecil kemungkinannya karena dari sejak awal strategi HTI lebih ke extra parlementer” (wawancara dengan Fendy, tanggal 20 Agustus 2018).

Sebagai sebuah ormas, meskipun sudah dicabut status hukumnya, bukan berarti HTI tidak bisa tetap eksis di Indonesia. HTI tetap bisa melakukan dakwah meskipun memang dakwah yang akan dilakukan akan diawasi secara ketat oleh pemerintah. Kemungkinan terjelek dari kasus hukum HTI, yang sekarang ini sedang menunggu sidang banding dari kasasi yang diajukan ke MA, HTI bisa menjadi sebuah organisasi tanpa bentuk (OTB). Keberadaan OTB di Indonesia diperbolehkan. Mereka juga diperbolehkan untuk beraktivitas meskipun dalam koridor-koridor hukum.

Pemerintah sendiri sangat aktif dalam menyikapi eks HTI pasca dibubarkan sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat. Tidak lama setelah dibubarkan pemerintah juga mengimbau para eks HTI untuk kembali ke NKRI dan kembali mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945



sebagai landasan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah juga menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri untuk mencegah terjadinya persekusi atau tindakan sewenang-wenang terhadap bekas anggota dan simpatisan HTI. Sebagaimana dinyatakan oleh Menkopolkum Wiranto, SKB 3 Menteri dibuat sebagai dasar pembinaan negara kepada para eks anggota HTI agar meninggalkan ideologi khilafah yang diusungnya. Adanya SKB tersebut dianggap tidak akan melarang eks HTI untuk berdakwah. Dakwah tetap boleh dilakukan asal tidak tidak menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 ([https://kbr.id/nasional/08-2017/skb\\_3\\_menteri\\_soal\\_eks\\_hti\\_\\_mencegah\\_atau\\_justru\\_melegitimasi\\_persekusi\\_/91593.html](https://kbr.id/nasional/08-2017/skb_3_menteri_soal_eks_hti__mencegah_atau_justru_melegitimasi_persekusi_/91593.html), diunduh tanggal 12 September 2018). SKB ini menegaskan bahwa dakwah oleh eks HTI tidak akan dilarang selama dalam koridor ideologi negara Pancasila dan UUD 1945. Setiap eks HTI hendaknya meninggalkan paham dan ideologi khilafah yang selama ini dianut selama menjadi bagian dari HTI.

## **B. Deradikalisasi**

Upaya dari HTI dan ormas sejenis untuk mengganti ideologi negara dengan sistem khilafah merupakan gerakan fundamentalisme Islam. Gerakan fundamentalisme ini juga

diidentifikasi sebagai gerakan radikalisme dalam Islam. Fundamentalisme dan radikalisme agama Islam diyakini tidak akan berhenti sampai tercapainya penerapan ideologi khilafah di negara dimana gerakan tersebut berkembang.

Menarik menyitir pendapat dari Kasdi (2002: 21) yang mengungkapkan bahwa terdapat beberapa karakter yang merupakan platform gerakan fundamentalisme, yakni (1) kelompok ini cenderung melakukan interpretasi literal terhadap teks-teks agama. Menurut mereka pemahaman secara kontekstual terhadap teks-teks agama disebut akan mereduksi kesucian agama; (2) menolak pluralisme dan relativisme. Pluralisme oleh kelompok ini disebut sebagai distorsi dalam pemahaman ajaran agama; (3) memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Kaum fundamentalis biasanya menganggap dirinya dan kelompoknya sebagai yang paling benar dalam menafsirkan agama sehingga cenderung untuk menganggap sesat kelompok yang tidak seialiran dengan mereka; (4) gerakan fundamentalisme mempunyai korelasi dengan fanatisme, eksklusifisme, intoleran, radikalisme, dan militanisme. Fundamentalisme selalu melakukan perlawanan terhadap ancaman yang dianggap membahayakan agama.

Azyumardi Azra mengungkapkan bahwa radikalisme di kalangan Islam bersumber dari: (1) pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong, parsial terhadap ayat-ayat Al-

Quran; (2) bacaan yang salah terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam pada masa tertentu; (3) deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat (Rapik, 2014). Para fundamentalis dan radikal-lantas tetap membawa pemahaman mereka di tengah-tengah masyarakat dimana dia hidup. Dalam kesehariannya dia selalu berusaha untuk mengimplementasikan pemahaman keagamaannya tersebut dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak heran kemudian berperilaku tidak sewajarnya masyarakat. Misalnya adalah tidak ikut upacara dan tidak mau hormat kepada bendera, mencela dasar dan falsafah negara dengan ideologi lain.

Hiariej, dkk (2018: 315) berpendapat bahwa kemunculan fundamentalisme Islam mesti dipahami sebagai bagian dari perlawanan yang lebih besar terhadap struktur penindasan. Dengan mengambil bentuk perjuangan identitas Islam yang spesifik, perlawanan-perlawanan ini mesti dipahami lebih jauh dalam hal politik representasi, dalam mana identitas Islam diproduksi dan diadopsi melalui sejumlah praktik-praktik diskursif. Identitas ini sama sekali tidak bersifat statis, padu dan sudah ada begitu saja, melainkan dimodifikasi terus menerus dan direproduksi dalam kehidupan sehari-hari aktivisnya.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) sudah memblokir sebagian situs-situs atau portal yang dianggap menyebarkan paham radikal di dunia maya. Yang terbaru adalah situs ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pasca dibubarkannya ormas tersebut oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasar Perppu Nomer 2 tahun 2017 tentang ormas radikal. Praktis sejak dibubarkannya ormas HTI tersebut, situs yang merupakan corong penyebaran informasi dan dakwahnya di ranah virtual tidak bisa diakses.

Sekali lagi dengan kasus HTI di atas, pemerintah juga memblokir Telegram. Telegram yang merupakan salah satu media sosial dianggap oleh pemerintah memiliki fitur-fitur yang cenderung pada praktik-praktik radikalisme. Selain itu pemerintah juga mengklaim Telegram tidak memiliki SOP yang jelas dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme.

Laporan dari reporter [tirto.id](http://tirto.id), Ahmad Zaenudin, menyebut bahwa tanggal 14 Juli 2017 lalu Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir 11 Domain Name Server yang terkait dengan Telegram. Pemblokiran tersebut dilakukan Kominfo dengan mengirimkan surat elektronik bersegera “271 (Sangat Segera) Penambahan Database Trust+Positif 14 Juli 2017” kepada para pengelola Internet

Service Provide (ISP) (<https://tirto.id/komunikasi-teroris-telegram-mati-gim-online-pun-jadi-csRz>, diunduh tanggal 30 September 2018). Apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kemenkominfo dengan mengusung isu radikalisme banyak dikritisi terutama oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah dianggap tebang pilih dan terkesan politis hendak mengebiri lawan-lawan politiknya. Dan yang paling sengit didengungkan adalah pemerintah dengan kebijakannya dalam menangani radikalisme di medsos diyakini bertindak sewenang-wenang terhadap Islam, dan mendiskreditkan para ulama yang mendukung ormas yang dibubarkan tersebut.

Terkait dengan pemblokiran situs-situs yang dianggap radikal oleh pemerintah, salah seorang anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi, menyebut bahwa jika media atau situs tersebut tidak memenuhi kaidah jurnalistik dan ternyata terbukti menyebarkan faham radikalisme atau kebencian, maka pemerintah dapat melakukan pemblokiran. Namun diakui juga olehnya bahwa pemblokiran hanya merupakan salah satu jalan. Hal yang terutama harus dilakukan adalah deradikalisasi agama melalui media secara berkelanjutan (<https://www.tifafoundation.org/upaya-deradikalisasi-agama-lewat-media/>, diunduh tanggal 5 November 2018).

Pembubaran ormas HTI dan pemblokiran berbagai situs yang terkait dengan HTI bukan merupakan langkah

pamungkas dalam rangka menanggulangi faham fundamentalisme agama atau radikalisme agama. Pemerintah juga tidak boleh abai dengan faham dan ideologi yang sudah terindoktrinasi begitu rupa pada eks HTI dan simpatisannya. Faham tentang khilafah tidak mungkin hilang begitu saja dengan dibubarkannya ormas pengusung khilafah atau dengan memblokir situs-situs dan website milik ormas tersebut. Ideologi tersebut akan tetap hidup, mungkin dalam waktu lama, dan bersifat laten yang sewaktu-waktu mungkin saja akan muncul kembali. Berdasar pada hal tersebut maka seyogyanya pemerintah harus memikirkan langkah-langkah yang tepat dalam upaya deradikalisasi eks HTI sehingga faham dan ideologi khilafah yang selama ini mereka yakini bisa tergerus dan hilang dari pikiran mereka atau setidaknya tidak lagi menganggap faham khilafah sebagai satu-satunya tujuan yang hendak dicapai.

Deradikalisasi adalah upaya untuk menurunkan paham radikal dari: kecenderungan memaksakan kehendak, keinginan untuk menghakimi orang yang berbeda dengan mereka, keinginan keras mengubah negara bangsa menjadi negara agama dengan menghalalkan segala cara, kebiasaan menggunakan kekerasan dan anarkisme dalam mewujudkan keinginan, kecenderungan bersikap eksklusif dan berlebihan dalam beragama, hasrat birahi menghalalkan darah orang lain

dan seolah mereka hidup di tengah rimba manusia yang menjadi lawan-lawan tuhan (Idris, 2017: 45).

Moderasi dianggap sebagai solusi deradikalisasi. Rapiq (2014) menyebut bahwa moderasi sebagai jalan atau cara beragama yang dewasa, yakni kesiapan untuk bersanding dengan orang yang berbeda keyakinan dan faham. Sikap moderat dalam beragama ditunjukkan dengan cara-cara berpikir dan bertindak yang mengambil jalan *tawassuth* (moderat), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (jalan tengah), *tasamuh* (toleran), yang tentu saja sangat sesuai dengan misi Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Dengan memiliki pandangan yang moderat, umat Islam sesungguhnya diajarkan untuk berpikir realistis terhadap problematika umat. Berpikir realistis menuntut umat Islam untuk senantiasa membaca realitas secara arif seraya mendialogkannya secara terus-menerus dengan pesan-pesan agama sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemauan dan kemampuan untuk mendialogkan teks agama dan konteks sejarah dipercaya akan membawa kemaslahatan, bukan hanya untuk umat Islam, melainkan juga buat umat lainnya sehingga tujuan Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* akan tercapai dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Praktik-praktik radikalisme dan fundamentalisme di medsos seyogyanya ditangani dengan gerakan deradikalisasi di

medsos atau gerakan deradikalisasi di ranah virtual. Gerakan literasi juga sangat penting dalam proses deradikalisasi ini. Deradikalisasi salah satunya bermuara pada bagaimana kita bertabayyun untuk setiap informasi dan pesan yang kita terima di ranah virtual.

Adapun deradikalisasi agama melalui beberapa cara (<https://www.tifafoundation.org/upaya-deradikalisasi-agama-lewat-media/>, diunduh tanggal 5 November 2018) yakni: *pertama*, membangun wajah Islam yang ramah dan damai dan meningkatkan *traffic* situs-situs Islam yang ramah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkaya konten situs tersebut. untuk mewujudkannya para ulama dapat terlibat dengan menyumbang berbagai tulisan yang mengandung nilai-nilai Islam yang damai kepada media Islam. Dengan keterlibatan para ulama, kredibilitas media Islam pun dapat meningkat. *Kedua*, di saat yang bersamaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Agama dapat merangkul media-media Islam dan mengajak mereka untuk senantiasa menyebarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Keduanya juga dapat membantu meningkatkan kapasitas dan jejaring media Islam agar mampu bersaing hingga akhirnya mengalahkan media Islam radikal.



Konten dari situs-situs Islam seyogyanya ditulis dengan tidak terlalu *njelimet*, serius, sebaliknya disampaikan dengan bahasa-bahasa populer kekinian yang mencirikan generasi milenial sehingga bisa diterima dan dipahami secara mudah dan cepat. Selain itu perlu juga diperhatikan bagaimana pengelolaan situs atau website yang harus setiap saat diperbarui konten beritanya dengan tampilan yang menarik sehingga secara tidak langsung akan membuat pengunjung tertarik untuk mengakses situs tersebut.

**Tabel 4.1 Respon Pemerintah terhadap eks HTI**

No	Respon Pemerintah	
	Merangkul HTI	Deradikalisasi
1	Inklusi eks HTI dan simpatisannya di masyarakat	Pemblokiran situs dan website HTI dan ormas radikal
2	Membuka kesempatan terlibat di berbagai ormas dan parpol	Memperbanyak dan memaksimalkan situs-situs Islam yang inklusif dan toleran terhadap pluralisme
3	Melalui berbagai aturan dan produk hukum untuk menghindari tindakan persekusi dan diskriminasi dari masyarakat	Moderasi Islam yang <i>rahmatan lil alamin</i>

Dengan berbagai langkah dan upaya tersebut di atas diharapkan berbagai ormas radikal khususnya HTI dan eks anggota dan simpatisannya bisa menjadi bagian dari NKRI

untuk bersama-sama dengan warga negara lainnya memajukan bangsa. Namun pemerintah tidak bisa sendiri, harus bergandeng tangan dengan seluruh komponen masyarakat sehingga penanganan terhadap para eks HTI dapat berlangsung tanpa diskriminasi dan stigmatisasi kepada mereka yang bisa berujung pada konflik horizontal di masyarakat.

## **Bab V**

### **Kesimpulan**

Tegaknya *khilafah* di Indonesia merupakan tujuan utama HTI. Hal tersebut tidak terbantahkan. HTI selalu menyebut bahwa dakwah merupakan cara yang ditempuh oleh mereka untuk mewujudkan khilafah. Dalam kenyataannya dakwah yang mereka lakukan merupakan proses indoktrinasi kepada kader dan calon anggota atau simpatisan HTI. Di berbagai dakwah yang mereka lakukan, ide khilafah selalu diwacanakan untuk ditegakkan di Indonesia. Dasar negara Pancasila dan UUD 1945 diserukan untuk diganti dengan sistem khilafah dan tuntutan untuk pemberlakuan hukum syariah dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Adanya ideologi khilafah, yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, dan terus diupayakan terwujud oleh HTI mendorong pemerintah untuk membubarkan HTI dengan mengeluarkan Perppu No. 2 tahun 2017.

Pasca dibubarkan HTI tetap “berdakwah” bahkan semakin masif dengan berbagai cara. Strategi dakwah mereka tidak jarang menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Diantara strategi dakwah tersebut adalah maksimalisasi media daring khususnya medsos sebagai media gerakan politik. Di medsos HTI sangat manipulatif, dengan berbagai postingan

dari akun-akun eks pengurus dan anggota serta simpatisannya yang sarat dengan wacana khilafah. Melalui medsos pun eks HTI menyerang pemerintah menempatkan kelompoknya sebagai pihak yang terdzalimi oleh pemerintah yang mempraktikkann sistem thogut.

Selain masif membangun wacana di medsos HTI juga melakukan infiltrasi ke dalam tubuh berbagai ormas dan parpol serta acara-acara dakwah (pengajian). Infiltrasi dilakukan oleh HTI untuk tetap menyebarkan ideologi khilafah sekaligus kaderisasi. Mereka sangat paham bahwa mereka sebagai ormas sudah dicabut status hukumnya melalui Perppu No. 2 Tahun 2017 yang merupakan lampu merah bagi mereka dalam melakukan aktivitas-aktivitas penggalangan massa sebagaimana sebelumnya. Karena itu infiltrasi dengan membonceng berbagai ormas dan parpol serta kegiatan keagamaan menjadi cara yang efektif. Atribut-atribut HTI bisa dimunculkan dan disebarkan meskipun bukan HTI. Insiden pembakaran bendera HTI pada peringatan HSN menjadi bukti sahah pemboncengan yang mereka lakukan. Dan insiden tersebut kemudian dimanfaatkan oleh HTI untuk memanipulasi wacana pembakaran bendera HTI tersebut menjadi wacana pelecehan tauhid umat Islam karena bendera yang dibakar bukan bendera HTI melainkan kalimat tauhid yang identik sebagai panji Rasulullah. Aksi demonstrasi massa di beberapa

kota setelahnya menjadi bukti sahih kesuksesan strategi infiltrasi dan manipulasi wacana yang dilakukan oleh HTI.

Dengan dibubarkannya HTI oleh pemerintah maka pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat terkait dengan eks anggota dan simpatisan HTI. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman masyarakat umum tentang HTI adalah identik sebagai organisasi radikal yang hendak mengganti falsafah negara Pancasila dengan khilafah. Dengan demikian eks anggota dan simpatisannya pun tidak heran memiliki pemahaman yang sama terkait sistem khilafah. Keberadaan anggota eks HTI dengan ideologi semacam itu sangat rawan diskriminasi dan stigmatisasi di masyarakat. Perundungan dan pelecehan kepada mereka seharusnya tidak terjadi. Hal tersebut merupakan praktik eskresi terhadap eks HTI. Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam dengan eskresi yang dialami oleh eks HTI di masyarakat.

Adapun respon pemerintah menyikapi eks HTI adalah dengan merangkul HTI dan gerakan deradikalisasi. Merangkul para eks HTI adalah suatu keniscayaan karena mereka adalah warga negara Indonesia yang tidak berbeda dengan masyarakat umum lainnya. Selain itu mereka pun diberikan kesempatan yang sama sebagaimana warga negara lainnya untuk terlibat dan terjun ke ormas-ormas ataupun parpol selama dalam koridor falsafah Pancasila dan NKRI. Pemerintah juga

mengeluarkan aturan dan produk hukum sebagaimana SKB 3 Menteri untuk menjamin mereka tidak mengalami diskriminasi dan tindakan persekusi di masyarakat.

Adapun cara kedua melalui gerakan deradikalisasi ialah dengan memblokir situs-situs ataupun website HTI dan sejenisnya yang dianggap mengajarkan dan menyebarkan faham radikalisme. Namun pemblokiran situs radikal merupakan langkah awal yang harus ditimpali dengan gerakan moderasi Islam untuk mensyiarkan Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Perlu juga pemerintah mengambil langkah untuk memperbanyak dan memaksimalkan situs-situs Islam yang inklusif dan toleran dengan konten yang disesuaikan dengan keseharian generasi milenial. Situs dan website perlu menggunakan bahasa populer atau kekinian sehingga mudah dipahami oleh generasi milenial. Kemasan situs juga perlu diperhatikan dan terus diperbaharui demi menarik jumlah pengunjung yang masif (*traffic*).[]

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Yahya. "Biografi Singkat Pendiri Hizbut Tahrir Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani." *dalam AL-Wa'ie*, No. 55, Th. V, edisi khusus (Maret), Maret 2005: 35-36.
- Afadlal, 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Afadlal. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Al-Amin, Ainur Rofiq. *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*. Yogyakarta: PT LKiS, 2012.
- Ali, As'ad Said. *Gerakan-Gerakan Sosial-Politik dalam Tinjauan Ideologis: Ideologi Gerakan Pasca Reformasi*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- al-Tahrir, Hizb. *Manhaj Hizb al-Tahrir fi al-Taghyir*. Beirut: Hizb a-Tahrir, 2009.
- Andriadi, Fayakhun. 2017. *Partisipasi Politik Virtual Demokrasi Netizen di Indonesia*. Jakarta: RM Books
- APJII. 2016. Buletin Edisi Bulan November
- APJII. 2017. *Infografis Hasil Survey Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. Jakarta: APJII

- Arif, Syaiful. 2018. *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Arif, Syaiful. *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2018.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2016. Buletin Edisi Bulan November.
- Burhan, Faika. 2017. Analisis Wacana terhadap Teks Berita Pembubaran HTI pada Media Online Liputan6.com Terbitan Mei-Juli Tahun 2017. *Jurnalisa*. Vol. 03 No. 1.
- Dja'far, Alamsyah M. 2018. (In)toleransi! Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Eriyanto. 2018. *Media dan Opini Publik Bagaimana Media Menciptakan Isu (Agenda Setting), Melakukan Pembingkai (Framing), dan Mengarahkan Pandangan Publik (Priming)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hasyim, S., 2016. *Penanggulangan Radikalisme dan Ekstrimisme Berbasis Agama*. s.l.:Artikel diunduh dari <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/penanggulan>



gan-radikalisme-dan-ekstremisme-berbasis-agama- pada  
19 Oktober 2017.

Hasyim, Syafiq. *Penanggulangan Radikalisme dan Ekstrimisme Berbasis Agama*. Artikel diunduh dari [http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/penanggulangan-radikalisme-dan-ekstremisme-berbasis-agama-pada 19 Oktober 2017](http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/penanggulangan-radikalisme-dan-ekstremisme-berbasis-agama-pada-19-Oktober-2017), 2016.

Hiariej, Eric, dkk. 2018. “Islamisme Pascafundamentalisme dan Politik Kewargaan di Indonesia” dalam Eric Hiariej dan Kristian Stokke (eds) *Politik Kewargaan di Indonesia*. Jakarta: YOI

Ibrahim, Idi Subandy. 2011. *Kritik Budaya Komunikasi Budaya, Media, dan Gaya Hidup Dalam Proses Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra.

Idris, Irfan. 2017. *Membumikan Deradikalisasi Soft Approach Model Pembinaan Terorisme dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan*. Jakarta: Daulat Press

Irianto, Agus Maladi. 2017. *Media dan Kebudayaan: Tantangan Ilmu Antropologi Membaca Dunia Kontemporer* (Pidato Pengukuhan Guru Besar). Semarang: Universitas Diponegoro (Tidak Diterbitkan).

Kasdi, Abdurrahman. 2002. “Fundamentalisme Islam Timur Tengah: Akar Teologi, Kritik Wacana, dan Politisasi

- Agama” dalam *Menggugat Fundamentalisme Islam*.  
Tashwirul Afkar. Edisi No. 13 Tahun 2002.
- KomnasHAM, 2017. *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016*. Jakarta: Komnas HAM.
- KomnasHAM. *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016*. Jakarta: Komnas HAM, 2017.
- Krekovic, Slavomir. 2003. *New Media Culture: Internet as a Tool of Cultural Transformation in Central and Eastern Europe*. Vienna: IWM Junior Visiting Fellows Conference, Vol. 14.
- Lubis, Erni Sari Dwi Devi & Jamuin, Ma’arif. 2015. *Infiltrasi Pemikiran dan Gerakan HTI di Indonesia*. Suhuf, Vol. 27 No. 2: 161-172.
- Masgono, 2009. Radikalisme atau Ekstrimisme?. *Harian Republika*.
- Masgono. "Radikalisme atau Ekstrimisme?" *Harian Republika*, 2009.
- Media Umat, 2017. *Perppu No 2 Tahun 2017 Rezim Diktator Mengancam Islam*. Jakarta: Pusat Kajian Islam dan Peradaban
- Mesch, Gustavo S. 2009. *The Internet And Youth Culture*. The Hedgehog Review.
- Novianto, Kholid. "Gerakan Keagamaan Transnasional di Dunia Islam dan Pemetaan Jejaknya di Indonesia."

*Jurnal Reforma Review, Vol. I, No. 1, April-Juni, 2007.*

Rahmat, M. I., 2017. *Pengantar dalam Komnas HAM, Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2017*. Jakarta: Komnas HAM.

Rahmat, M. Imdadun. *Pengantar dalam Komnas HAM, Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2017*. Jakarta: Komnas HAM, 2017.

Rapik, Mohamad. 2014. *Deradikalisasi Faham Keagamaan Sudut Pandang Islam*. Inovatif, Volume VII Nomer II.

Schmid, A. P., 2013. *Radicalisation, De-radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literatur Review*, The Nertherlands: ICCT.

Schmid, Alex P. *Radicalisation, De-radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literatur Review*. The Hague Research Paper, The Nertherlands: ICCT, 2013.

Striegher, J.-L., 2015. *Violent-Extremism: An Examination of A Definitional Dilemma*. Perth Western Australia, Cowan University Joondalup Campus, p. 76.

Striegher, Jason-Leigh. "Violent-Extremism: An Examination of A Definitional Dilemma." *Australian Scurity and Intellegency Confrence*. Perth Western Australia: Cowan University Joondalup Campus, 2015. 76.

- Sugihartati, Rahma. 2014. *Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Susanto, E., 19 Juli 2017. *Kemenkumham Beberkan 5 Poin Pembubaran HTI*, Jakarta: Koran Tempo diunduh dari Read more at <https://nasional.tempo.co/read/892605/kemenkumham-beberkan-5-poin-alasan-pembubaran-hti#V1DvPoL22kcDaCsU.99>.
- Susanto, Elik. *Kemenkumham Beberkan 5 Poin Pembubaran HTI*. Jakarta: Koran Tempo diunduh dari Read more at <https://nasional.tempo.co/read/892605/kemenkumham-beberkan-5-poin-alasan-pembubaran-hti#V1DvPoL22kcDaCsU.99>, 19 Juli 2017.
- Tashwirul Afkar. 2002. *Menggugat Fundamentalisme Islam*. Edisi Nomer 13. Jakarta.
- Tibi, B., 2000. *Ancaman Fundamentalisme Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Tibi, B., 2016. *Islam dan Islamisme*. Bandung: Mizan.
- Tibi, Bassam. *Ancaman Fundamentalisme Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2000.

Yahya, A.R (penyunting). 2008. *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*. Jakarta: HTI-Press

### **Sumber internet**

www.mediaumat.com

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/20562031/apa-data-dan-fakta-yang-dimiliki-pemerintah-untuk-bubarkan-hti->

<https://bidikdata.com/gugatan-ditolak-mahkamah-konstitusi-hti-kini-bergerilya-melalui-media-online.html>

<https://bidikdata.com/ajukan-kasasi-hti-menjilat-ludah-sendiri.html>

<https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-survey-instant-messaging-2017>

<https://tirto.id/cara-dakwah-hti-memikat-pengikut-dan-simpatisan-di-kampus-cs9d>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/01/16580851/wiran-to-sebut-aksi-bela-tauhid-buang-energi-dan-tidak-relevan>

<https://seword.com/sosbud/repson-warga-medsos-terhadap-pembubaran-hti-80-positif>

<https://news.detik.com/berita/d-3570772/hti-sebelum-diblokir-kami-sudah-tutup-situs-secara-mandiri>

<https://techno.okezone.com/read/2018/03/13/207/1872093/ini-jumlah-total-pengguna-media-sosial-di-indonesia>;

katadata.co.id

<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/09/17180491/wiranto-demo-soal-pembakaran-bendera-ditunggangi-eks-anggota-hti>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/09/13581341/ini-kesepakatan-menko-polhukam-dan-sejumlah-ormas-islam-soal-pembakaran>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180926201737-12-333491/banding-ditolak-hti-ajukan-kasasi-ke-mahkamah-agung>

<http://mediaindonesia.com/read/detail/193243-sekjen-pbnu-satu-truk-bendera-hti-dimobilisasi-untuk-infiltrasi-hsn>

<https://tirto.id/kpu-persilakan-parpol-rekrut-eks-anggota-hti-cGhZ>

<http://inibenar.com/diloloskan-bawaslu-pbb-galang-kekuatan-dengan-hti-di-pemilu-2019/>

[https://kbr.id/nasional/08-2017/skb\\_3\\_menteri\\_soal\\_eks\\_hti\\_\\_mencegah\\_atau\\_justru\\_melegitimasi\\_persekusi\\_/91593.html](https://kbr.id/nasional/08-2017/skb_3_menteri_soal_eks_hti__mencegah_atau_justru_melegitimasi_persekusi_/91593.html)

<https://tirto.id/komunikasi-teroris-telegram-mati-gim-online-pun-jadi-csRz>

<https://www.tifafoundation.org/upaya-deradikalisasi-agama-lewat-media/>

<https://tirto.id/kontroversi-kemenristek-dikti-awasi-medsos-dosen-dan-mahasiswa-cMiq>